cisdi
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives

DAMPAK MAKROEKONOMI CUKAI ROKOK DI INDONESIA: PEMBARUAN TAHUN 2025

Penulis:

Muhammad Zulfiqar Firdaus, Fariza Zahra Kamilah, Beladenta Amalia , Muhammad Anugrah Saputra, Sofwatun Nida, Usman, I Dewa Gede Karma Wisana



Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)
2026

Dampak Makroekonomi Cukai Rokok di Indonesia: Pembaruan Tahun 2025

Muhammad Zulfiqar Firdaus

Fariza Zahra Kamilah

Beladenta Amalia

Muhammad Anugrah Saputra

Sofwatun Nida

Usman

I Dewa Gede Karma Wisana

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), 2026

Suggested citation:
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2026). *Dampak Makroekonomi Cukai Rokok di Indonesia: Pembaruan Tahun 2025*. Jakarta: CISDI

Pendanaan:
Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) didanai oleh program Economics for Health yang berbasis di Department of Health, Behavior & Society, Bloomberg School of Public Health Johns Hopkins University untuk melakukan riset ekonomi terkait pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia. Johns Hopkins University merupakan mitra dari Bloomberg Philanthropies dalam menurunkan konsumsi tembakau. Pandangan yang disampaikan dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai representasi resmi dari Johns Hopkins University maupun Bloomberg Philanthropies.

Desain over dan tata letak dokumen:
Ika Purwaningtyas

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iii

Ringkasan Eksekutif iv

1. Pendahuluan 2

2. Konteks Kebijakan dan Tinjauan Pustaka 4

2.1 Gambaran Umum Industri Rokok di Indonesia 4

2.2 Sistem Cukai Rokok di Indonesia 6

2.3 Dampak Kenaikan Harga dan Cukai Rokok pada Berbagai Indikator Ekonomi 8

3. Data 10

4. Kerangka Analisis 12

4.1 Estimasi Perubahan Harga Rokok 13

4.2 Estimasi Perubahan dalam Permintaan 15

4.3 Estimasi Tambahan Pendapatan Pemerintah 16

4.4 Analisis Input Output (IO) 17

4.5 Estimasi Dampak Makroekonomi 18

5. Hasil 22

5.1 Hubungan Antarsektor antara Sektor Rokok dan Sektor Lainnya 22

5.1.1 Struktur Input-Output pada Sektor Rokok 22

5.1.2 Pengganda Output 23

5.1.3 Pengganda Pendapatan 24

5.1.4 Pengganda Ketenagakerjaan 26

5.2 Dampak Makroekonomi dari Reformasi Cukai Rokok 27

5.2.1 Dampak Makroekonomi Lintas Skenario 27

5.2.2 Dampak Makroekonomi Lintas Skenario 31

5.2.3 Dekomposisi Dampak Ekonomi pada Skenario dengan Keuntungan Ekonomi Tertinggi 33

5.2.4 Perbandingan dengan studi CISDI tahun 2021 34

5.2.5 Potensi Transisi Tenaga Kerja dari Sektor Tembakau 35

6. Pembahasan 38

Lampiran 1. Ringkasan tabel IO (55 Sektor) 44

Lampiran 2. Analisis sensitivitas elastisitas 47

Lampiran 3. Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario (C, D, dan E) 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat dan tarif cukai rokok pada tahun 2026 7
Tabel 2. Sumber data untuk memperbarui tabel IO tahun 2020 10
Tabel 3. Data rokok 11
Tabel 4. Elastisitas harga sendiri dan elastisitas harga silang yang digunakan dalam analisis utama 16
Tabel 5. Istilah-istilah pada model Input Output 17
Tabel 6. Simulasi makroekonomi 18
Table 7a. Struktur input-output pada sektor rokok (input) 23
Table 7b. Struktur input-output pada sektor rokok (output) 23
Tabel 8. Pengganda output pada sektor rokok 24
Tabel 9. Lima sektor teratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok berdasarkan pengganda output Tipe-II 24
Tabel 10. Pengganda pendapatan pada sektor rokok 25
Tabel 11. Lima sektor teratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok berdasarkan pengganda pendapatan Tipe-II 25
Tabel 12. Pengganda ketenagakerjaan menurut jenis rokok (jumlah orang per 10 miliar rupiah output) 26
Tabel 13. Komposisi sektoral dari pengganda ketenagakerjaan Tipe-II pada subsektor rokok 27
Tabel 14. Sektor tujuan potensial untuk transisi tenaga kerja dari sektor tembakau 36
Tabel A1. Ringkasan tabel IO 44
Tabel A2.1 Sensitivitas estimasi dampak terhadap asumsi elastisitas alternatif 47
Tabel A2.2 Dampak berdasarkan elastisitas Susenas tahun 2020–2024 pada berbagai skenario kenaikan cukai di bawah penyederhanaan tingkat cukai yang komprehensif 48
Tabel A3.1 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario C (konvensional/business as usual) 49
Tabel A3.2 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.I (sektor terkait kesehatan) 51
Tabel A3.3 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.II (pembiayaan kesehatan dan penyediaan layanan) 53
Tabel A3.4 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario E (program bantuan sosial) 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penjualan dan produksi rokok 4
Gambar 2. Pangsa pasar produksi rokok (2019 - 2024) 6
Gambar 3. Kerangka analisis 12
Gambar 4. Skenario reformasi cukai rokok 13
Gambar 5. Tambahan penerimaan pemerintah cukai dan perubahan permintaan rokok pada berbagai skenario 28
Gambar 6. Perubahan permintaan berdasarkan jenis rokok di berbagai skenario 30
Gambar 7. Dampak reformasi cukai rokok: output, pendapatan, dan ketenagakerjaan 32
Gambar 8. Dekomposisi dampak 33
Gambar 9. Dampak makroekonomi bersih pada studi 2021 dan situasi 2025 (nilai nominal) 35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menerapkan sejumlah reformasi cukai rokok, termasuk kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan lapisan (*layer*) tarif cukai. Meskipun berbagai reformasi tersebut telah diterapkan, harga rokok masih relatif terjangkau. Di sisi lain, pembahasan kebijakan mengenai reformasi cukai rokok masih diwarnai oleh kekhawatiran bahwa kenaikan cukai hasil tembakau dapat mengurangi kesempatan kerja dan melemahkan kinerja perekonomian. Namun, kekhawatiran tersebut sebagian besar berfokus pada hubungan antara kenaikan cukai rokok, penurunan permintaan rokok, dan dampaknya terhadap penjualan serta aktivitas ekonomi di sektor tembakau, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampak reformasi tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian ini mengkaji dampak reformasi cukai rokok terhadap perekonomian secara keseluruhan di Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output (IO). Dua belas skenario kebijakan yang menggabungkan berbagai tingkat kenaikan cukai dan tingkat simplifikasi *layer* cukai dievaluasi, bersama dengan empat skema alokasi pendapatan pemerintah dari cukai yang berbeda. Penelitian ini menelaah bagaimana reformasi cukai rokok memengaruhi konsumsi rokok, pendapatan pemerintah, output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja di seluruh tingkat perekonomian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok menghasilkan dampak makroekonomi yang positif di seluruh skenario simulasi. Cukai rokok yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi rokok sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dan menghasilkan keuntungan bersih dalam hal output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Analisis tersebut lebih lanjut menunjukkan bahwa simplifikasi tingkatan cukai secara substansial meningkatkan efektivitas cukai rokok, sehingga menghasilkan penurunan konsumsi rokok dan pendapatan pemerintah yang lebih tinggi untuk setiap kenaikan tarif cukai.

Di antara skenario yang dianalisis, estimasi keuntungan makroekonomi bersih terbesar dicapai melalui kenaikan tarif cukai sebesar 50% disertai dengan penyederhanaan *layer* tarif untuk rokok linting tangan maupun rokok mesin. Dalam skenario ini, output ekonomi diperkirakan meningkat sekitar Rp315,1 triliun dan pendapatan agregat rumah tangga sebesar Rp81,7 triliun, sementara lapangan kerja bertambah sekitar 1,14 juta lowongan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa cukai rokok seharusnya dipandang tidak hanya sebagai intervensi terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan ekonomi. Kenaikan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan penyederhanaan berkelanjutan terhadap struktur tingkatan cukai, dapat secara bersamaan mengurangi konsumsi rokok, memperkuat pendapatan pemerintah, dan menghasilkan dampak ekonomi positif secara menyeluruh.

TEMUAN UTAMA

- **Reformasi cukai hasil tembakau merupakan kebijakan paling efektif terhadap meningkatnya beban ekonomi.** Beban ekonomi akibat merokok di Indonesia meningkat 59% dalam enam tahun, dari Rp172 triliun pada 2019 menjadi Rp274 triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp353 triliun pada 2029 jika prevalensi merokok tidak berubah. Kenaikan cukai rokok mendorong kenaikan harga dan menurunkan konsumsi, sehingga dapat mengatasi sumber beban ekonomi tersebut.

- **Kenaikan cukai dan simplifikasi *layer* memberikan manfaat ekonomi secara menyeluruh.** Seluruh skenario simulasi menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok dapat menurunkan konsumsi sekaligus meningkatkan output ekonomi, pendapatan agregat rumah tangga, dan lapangan kerja bersih. Tambahan penerimaan negara dari kenaikan cukai yang dialokasikan untuk belanja pemerintah turut mendorong aktivitas ekonomi. Penyederhanaan struktur tarif dari delapan menjadi empat *layer* memperkuat dampak tersebut dengan mengurangi insentif konsumen untuk beralih ke produk dengan tarif lebih rendah (down-trading), sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

- **Kenaikan tarif sebesar 50% dan simplifikasi dari delapan (8) menjadi empat (4) *layer* tarif menghasilkan manfaat ekonomi terbesar.** Kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen yang disertai penyederhanaan *layer* tarif SKT dan SKM/SPM secara bersamaan (dari delapan *layer* menjadi empat *layer*) diperkirakan akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 10,1 persen, menghasilkan tambahan penerimaan cukai rokok sekitar Rp109,6 triliun, meningkatkan output ekonomi sebesar Rp315,1 triliun, meningkatkan pendapatan agregat rumah tangga sebesar Rp81,7 triliun, dan menciptakan 1,14 juta lapangan kerja.

Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok berpotensi mencapai tujuan kesehatan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pemerintah perlu memastikan alokasi tambahan penerimaan yang efektif serta mendukung transisi tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan yang terarah.

1
PENDAHULUAN

Konsumsi tembakau masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 70 juta warga Indonesia merupakan perokok aktif, yang mewakili 31,9% dari populasi dewasa berusia 18 tahun ke atas. Prevalensi merokok tetap sangat mengkhawatirkan di kalangan laki-laki, dengan 60,7% laki-laki dewasa merokok dibandingkan dengan 1,3% perempuan dewasa, sementara 7,4% remaja berusia 10–18 tahun juga merupakan perokok aktif [1]. Angka-angka ini menegaskan epidemi tembakau yang terus berlanjut di negara ini dan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah pengendalian tembakau yang lebih ketat. Selain konsekuensi kesehatan yang menghancurkan, penggunaan tembakau juga menimbulkan beban ekonomi yang substansial bagi Indonesia. Estimasi terbaru menunjukkan bahwa beban ekonomi akibat merokok meningkat 59% selama enam tahun, dari Rp172 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp274 triliun pada tahun 2025, sekitar 1,1% dari PDB, yang didorong oleh meningkatnya biaya perawatan kesehatan serta hilangnya produktivitas. Jika prevalensi merokok tetap stagnan, angka ini diproyeksikan akan mencapai Rp353 triliun pada tahun 2029 [2]. Kondisi ini, ditambah dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM), menjadikan penurunan konsumsi tembakau semakin mendesak sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi dampak ekonomi di Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menopang tingginya konsumsi rokok di Indonesia adalah rokok yang tetap terjangkau. Meskipun cukai rokok telah meningkat selama satu dekade terakhir, kenaikan tersebut tidak konsisten dan sering kali diimbangi oleh meningkatnya pendapatan serta perbedaan harga yang terus-menerus terjadi di antara berbagai produk rokok. Struktur cukai rokok Indonesia yang kompleks dan berjenjang memungkinkan produsen memasarkan rokok dalam rentang harga yang luas, sehingga perokok dapat beralih ke merek yang lebih murah (down-trading) daripada berhenti merokok atau mengurangi konsumsi ketika cukai meningkat [3,4]. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan cukai tembakau tidak hanya memerlukan kenaikan cukai secara berkala, tetapi juga penyederhanaan sistem cukai berjenjang saat ini untuk mempersempit kesenjangan harga dan meningkatkan efektivitas kebijakan cukai tembakau sebagai upaya penguatan kesehatan masyarakat.

Meskipun terdapat bukti global telah menunjukkan bahwa cukai merupakan salah satu kebijakan pengendalian tembakau yang paling efektif [5], ckekhawatiran mengenai konsekuensi ekonomi terus menjadi sorotan utama dalam perdebatan kebijakan di Indonesia. Secara khusus, pembahasan mengenai dampak ekonomi dari kenaikan cukai rokok sering kali berfokus pada potensi dampak penurunan permintaan rokok terhadap produksi dan lapangan kerja di sektor tembakau. Namun, dampak reformasi cukai rokok tidak hanya terbatas pada perubahan permintaan rokok dan aktivitas ekonomi di sektor tembakau, tetapi juga mencakup dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Perubahan pengeluaran rumah tangga pascareformasi, bersama dengan alokasi pendapatan tambahan pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan cukai, dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi lainnya. Apabila dampak

terhadap perekonomian secara keseluruhan ini diperhitungkan, penelitian sebelumnya menemukan bahwa reformasi cukai tembakau dapat memiliki dampak ekonomi bersih yang netral atau positif sekaligus secara efektif mengurangi konsumsi tembakau di Indonesia [6]. Sejalan dengan bukti ini, analisis makroekonomi kami sebelumnya menemukan bahwa kenaikan cukai tembakau tidak akan merugikan perekonomian nasional. Sebaliknya, analisis tersebut memproyeksikan peningkatan output nasional, pendapatan rumah tangga agregat, dan lapangan kerja seiring dengan penurunan konsumsi rokok [7].

Berdasarkan analisis makroekonomi kami sebelumnya pada tahun 2021, penelitian ini menyajikan estimasi terbaru mengenai dampak ekonomi dari reformasi cukai tembakau dengan menggunakan data yang lebih terkini dan kerangka analisis yang disempurnakan. Pertama, analisis penelitian ini menggunakan Tabel Input-Output (IO) Indonesia yang telah diperbarui untuk lebih mencerminkan struktur perekonomian terkini. Kedua, penelitian ini memasukkan beberapa pemutakhiran metodologi dengan memisahkan sektor rokok menjadi tiga subsektor yang berbeda, yaitu rokok kretek mesin (Sigaret Kretek Mesin, SKM), rokok kretek linting tangan (Sigaret Kretek Tangan, SKT), dan rokok putih mesin (Sigaret Putih Mesin, SPM). Ketiga, penelitian ini juga mengevaluasi dampak makroekonomi dari penyederhanaan *layer* cukai rokok di samping kenaikan tarif cukai. Dengan memasukkan data yang terkini, pembaruan metodologi, dan rentang skenario kebijakan yang lebih luas, penelitian ini menyediakan bukti yang lebih terkini dan relevan bagi pembuat kebijakan untuk mendukung reformasi cukai tembakau di Indonesia

Laporan penelitian ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 memberikan gambaran umum mengenai industri rokok di Indonesia, kebijakan perpajakan dan cukai rokok, serta meninjau literatur yang ada mengenai dampak kenaikan harga/cukai rokok terhadap berbagai indikator. Bagian 3 menjelaskan data yang digunakan dalam analisis, sedangkan Bagian 4 memaparkan kerangka kerja analisis dan simulasi. Bagian 5 memaparkan analisis keterkaitan antarsektor dalam industri rokok Indonesia, diikuti oleh hasil simulasi. Terakhir, Bagian 6 menyimpulkan dengan merangkum temuan utama dan membahas implikasi kebijakannya.

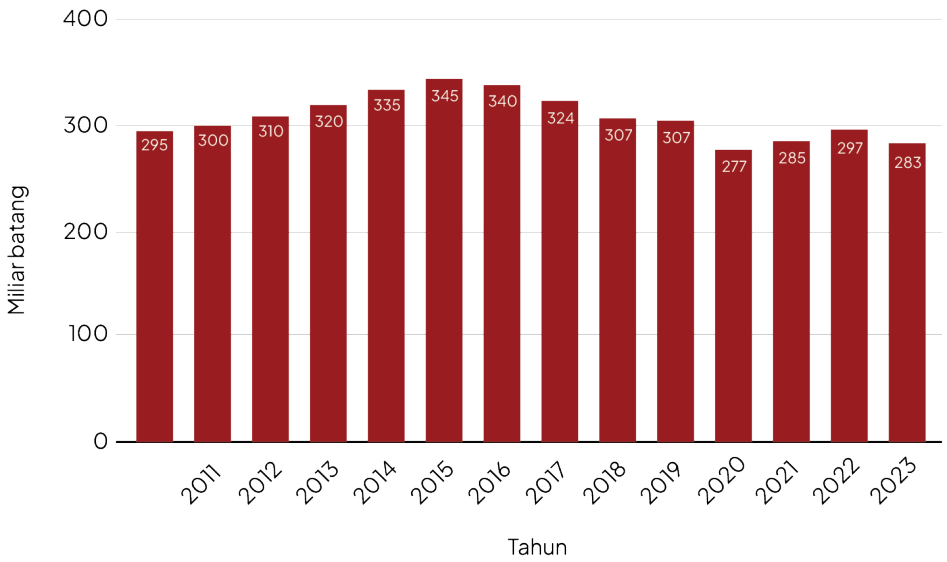
2
KONTEKS KEBIJAKAN DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Industri Rokok di Indonesia

Meskipun berbagai upaya untuk memperkuat pengendalian tembakau telah dilakukan, termasuk kenaikan berulang-ulang atas cukai rokok dan dua kali penyederhanaan *layer* selama satu dekade terakhir, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar rokok terbesar di dunia [8]. Skala industri rokok Indonesia tercermin baik dalam penjualan maupun produksi rokok. Data penjualan Euromonitor International, yang tersedia untuk periode 2010–2023, menunjukkan bahwa penjualan rokok tahunan tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi, berfluktuasi di sekitar 300 miliar batang selama dekade terakhir. Penjualan meningkat dari 295 miliar batang pada tahun 2010 ke puncaknya sebesar 345 miliar batang pada tahun 2015, sebelum secara bertahap menurun menjadi 283 miliar batang pada tahun 2023 (Gambar 1.a). Data administratif resmi dari Kementerian Keuangan, yang tersedia untuk periode 2019–2024, juga menunjukkan bahwa produksi rokok secara konsisten tetap di atas 300 miliar batang per tahun, mencapai puncaknya pada 356,9 miliar batang pada tahun 2021 sebelum melambat menjadi 317,8 miliar batang pada tahun 2024 (Gambar 1.b). Meskipun penjualan dan produksi rokok telah menunjukkan tanda-tanda perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, volume yang tetap tinggi tersebut menegaskan skala pasar rokok Indonesia yang sangat besar serta tantangan yang terus berlanjut dalam mengurangi konsumsi rokok.

Gambar 1. Penjualan dan produksi rokok

Panel a. Penjualan rokok (miliar batang)



Sumber: Euromonitor International (2025)

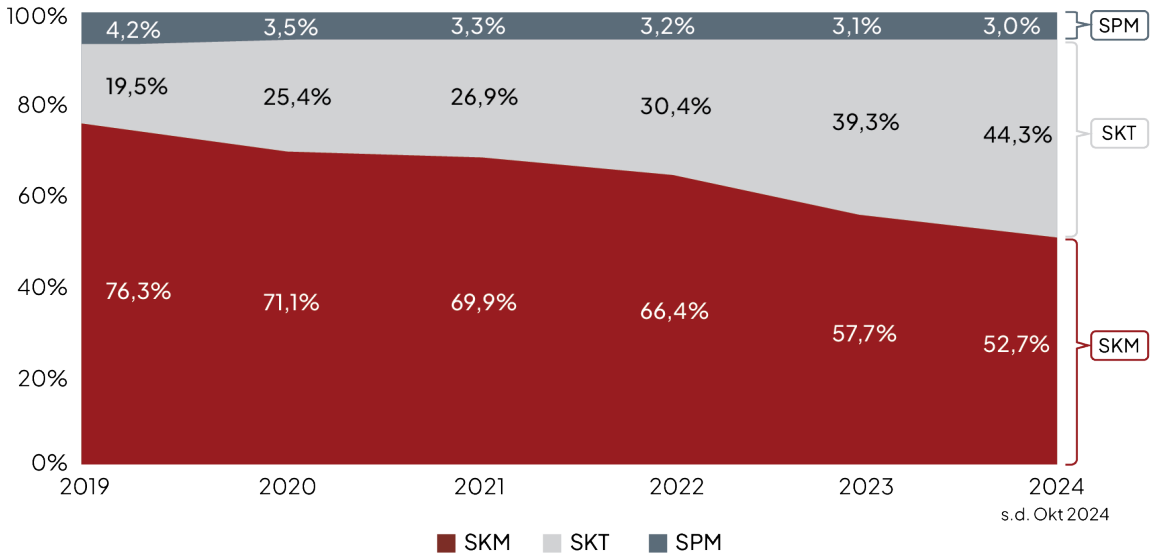
Panel b. Produksi rokok (miliar batang)



Sumber: Kementrian Keuangan, 2024

Industri rokok di Indonesia didominasi oleh rokok kretek, produk khas yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh, yang menyumbang sebagian besar produksi dan konsumsi rokok di negara ini. Rokok kretek diproduksi dalam dua bentuk utama: SKM dan SKT yang merupakan rokok biasa tanpa cengkeh, yang hanya mewakili pangsa pasar domestik yang kecil. Meskipun SKM masih mendominasi pasar rokok di Indonesia, komposisi pangsa pasar rokok Indonesia telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data produksi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pangsa pasar gabungan SKM menurun dari 76,3% pada tahun 2019 menjadi 52,7% pada tahun 2024, sementara pangsa SKT meningkat dari 19,5% menjadi 44,3% selama periode yang sama. Penurunan pangsa SKM dan peningkatan pangsa SKT mungkin mengindikasikan pergeseran pasar di mana konsumen kretek beralih ke merek SKT yang lebih murah. Sebaliknya, rokok putih (SPM) secara konsisten hanya menyumbang sekitar 3-4% dari total produksi rokok (Gambar 2). Angka-angka ini menggambarkan komposisi industri rokok Indonesia yang semakin beragam, dengan perbedaan substansial dalam teknologi produksi, intensitas tenaga kerja, dan pangsa pasar di seluruh kategori rokok. Perbedaan tersebut perlu diperhatikan karena sistem cukai rokok di Indonesia mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, sehingga reformasi cukai dapat menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda pada setiap kategori rokok.

Gambar 2. Pangsa pasar produksi rokok (2019 - 2024)



Sumber: Perhitungan ulang penulis berdasarkan data produksi rokok dari Kementerian Keuangan

2.2 Sistem Cukai Rokok di Indonesia

Sistem Cukai dan Perpajakan rokok di Indonesia terdiri dari tiga komponen pajak–(1) cukai rokok, (2) pajak rokok provinsi, dan (3) pajak pertambahan nilai (PPN)–serta harga jual eceran (HJE) minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Cukai rokok merupakan komponen terbesar dari beban pajak keseluruhan atas rokok dan dikenakan secara spesifik per batang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain itu, pajak rokok provinsi dikenakan sebesar 10% dari cukai rokok, sedangkan PPN secara efektif dikenakan sebesar 9,9% dari HJE berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025.

Berdasarkan data dasar (baseline) yang digunakan dalam penelitian ini (Tabel 1), total pajak rokok, yang mencakup cukai, pajak rokok provinsi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyumbang sekitar 58% dari harga eceran rata-rata tertimbang. Dari jumlah tersebut, cukai saja menyumbang sekitar 44%. Angka ini masih jauh di bawah acuan 75% dari harga eceran yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai praktik terbaik dalam kebijakan perpajakan tembakau [5]. Rendahnya beban pajak ini turut menyebabkan harga rokok di Indonesia tetap terjangkau. Indonesia memiliki struktur cukai rokok yang kompleks, di mana tarif cukai bervariasi sesuai dengan jenis rokok, metode produksi, dan skala produksi tahunan produsen. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, produk rokok sering diklasifikasikan menjadi SKM, SKT, dan SPM, sementara produsen diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam *layer* cukai yang berbeda berdasarkan volume produksi tahunan mereka. Saat ini, sistem cukai rokok Indonesia terdiri dari delapan *layer*, menyusul serangkaian reformasi yang secara bertahap telah menyederhanakan struktur tarif dalam beberapa tahun terakhir. Tarif cukai rokok yang berlaku untuk setiap *layer*, yang mulai berlaku pada tahun 2026, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Cigarette excise tiers and tariffs in 2026

Jenis	Tingkatan	Produsen Volume produksi tahunan	Tarif Cukai (Rp/batang)	HJE (Rp/batang)
Rokok putih mesin (Sigaret Putih Mesin, SPM)	I	> 2 miliar batang	1.336	2.495
	II	≤ 2 miliar batang	794	1.565
Rokok kretek mesin (Sigaret Kretek Mesin, SKM)	I	> 3 miliar batang	1.231	2.375
	II	≤ 3 miliar batang	746	1.485
Rokok kretek linting tangan (Sigaret Kretek Tangan, SKT)	IA	> 2 miliar batang	483	2.170
	IB	> 500 juta – 2 miliar batang	378	1.555
	II	> 50 juta – 500 miliar batang	223	995
	III	≤ 50 miliar batang	122	860

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Tembakau.
Catatan: Tarif cukai rokok dan HJE saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru (PMK No. 97 Tahun 2024), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 dan tetap berlaku pada tahun 2026. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah mempertahankan tarif cukai rokok pada tingkat tahun 2024, sementara menaikkan HJE untuk semua kategori rokok pada tahun 2025. Tidak ada penyesuaian lebih lanjut terhadap tarif cukai maupun HJE yang diberlakukan pada tahun 2026.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia secara bertahap telah menyederhanakan struktur cukai berjenjang. Jumlah *layer* cukai dikurangi dari 12 menjadi 10 pada tahun 2020, dan selanjutnya dari 10 menjadi 8 pada tahun 2022, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan administrasi perpajakan dan memperkuat pengendalian tembakau. Meskipun reformasi tersebut telah dilakukan, Indonesia tetap mempertahankan salah satu sistem cukai rokok yang paling rumit di dunia. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa struktur cukai berjenjang yang kompleks merusak efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau. Besarnya perbedaan tarif cukai antara layer terendah dan tertinggi dalam sistem cukai berjenjang menciptakan insentif bagi produsen untuk menyesuaikan strategi produksi agar dapat dikenakan tarif cukai yang lebih rendah. Di sisi konsumen, perbedaan tarif tersebut juga dapat mendorong peralihan ke produk rokok yang lebih murah, alih-alih berhenti merokok atau mengurangi konsumsi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa produsen dapat menyesuaikan strategi produksi agar tetap berada di layer cukai yang lebih rendah, sementara perokok dapat merespons kenaikan cukai dengan beralih ke merek rokok yang lebih murah daripada berhenti merokok atau mengurangi konsumsi [11]. Bukti terbaru dari penelitian mengenai tingkat keterjangkauan rokok yang kami lakukan semakin menunjukkan bahwa struktur cukai rokok Indonesia yang kompleks telah membuat rokok tetap relatif terjangkau meskipun terjadi kenaikan cukai berulang kali selama satu dekade terakhir, sehingga memperkuat pentingnya penyederhanaan layer cukai secara berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi cukai tembakau di masa depan [3].

2.3 Dampak Kenaikan Harga dan Cukai Rokok pada Berbagai Indikator Ekonomi

Secara global, sejumlah bukti telah menunjukkan bahwa menaikkan cukai rokok merupakan salah satu instrumen kebijakan paling efektif untuk menaikkan harga eceran, mengurangi keterjangkauan, dan mengurangi konsumsi rokok [12–14]. Di Indonesia, Barber dkk. mengestimasi bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 13% dapat mengurangi jumlah perokok sekitar 4% [15]. Penelitian kami sebelumnya menunjukkan bahwa keterjangkauan rokok tetap menjadi penentu utama permintaan rokok di Indonesia, di mana penurunan tingkat keterjangkauan sebesar 10% dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 7,7% [3].

Harga rokok yang lebih tinggi juga memengaruhi perilaku merokok dengan mengurangi inisiasi merokok dan mendorong berhentinya merokok. Penelitian kami sebelumnya menemukan bahwa kenaikan cukai rokok secara signifikan mengurangi probabilitas inisiasi merokok di kalangan remaja Indonesia [16] sekaligus meningkatkan kemungkinan berhenti merokok di kalangan perokok dewasa [17]. Efek tersebut ternyata lebih signifikan dalam mengurangi inisiasi merokok daripada dalam mendorong penghentian merokok, yang menunjukkan bahwa cukai tembakau sangat efektif dalam mencegah kaum muda mulai merokok sekaligus mendorong perokok yang sudah ada untuk berhenti. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini memperkuat peran cukai tembakau sebagai salah satu intervensi pengendalian tembakau yang paling efektif.

Selain perubahan dalam perilaku merokok, kenaikan cukai rokok menghasilkan manfaat kesehatan dan fiskal yang signifikan. Penurunan konsumsi rokok mengurangi insiden penyakit terkait merokok, angka kematian akibat merokok, dan pengeluaran layanan kesehatan, sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah yang berasal dari cukai [18–20]. Oleh karena itu, pengenaan cukai tembakau telah secara luas diakui sebagai salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling hemat biaya, yang secara bersamaan meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal pemerintah.

Dampak kenaikan cukai rokok juga melampaui sektor kesehatan hingga ke perekonomian secara lebih luas. Penurunan konsumsi rokok mendorong rumah tangga untuk mengalihkan pengeluaran ke barang dan jasa lain, sementara pendapatan tambahan pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan cukai dapat dialokasikan untuk program publik atau investasi produktif lainnya [20]. Perubahan-perubahan ini memengaruhi produksi, pendapatan agregat rumah tangga, lapangan kerja, dan nilai tambah di berbagai sektor melalui keterkaitan antarsektor. Akibatnya, semakin banyak penelitian yang menggunakan pendekatan analisis skala ekonomi, termasuk model input-output (IO) dan model keseimbangan umum yang dapat dihitung (*CompuTabel General Equilibrium,* CGE), untuk mengevaluasi dampak makroekonomi dari cukai tembakau [6,21,22].

Penelitian mengenai dampak makroekonomi kami sebelumnya pada tahun 2021 memberikan penilaian pertama yang komprehensif mengenai kenaikan cukai tembakau di Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja IO [7]. Penelitian kami mencakup tiga saluran transmisi utama dari cukai hasil tembakau: penurunan konsumsi rokok, penyesuaian pengeluaran rumah tangga untuk komoditas di luar rokok , dan pengeluaran pemerintah tambahan yang dibiayai oleh peningkatan

pendapatan dari cukai tembakau. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tambahan tersebut mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor non-rokok, sehingga menghasilkan dampak bersih positif terhadap output nasional, pendapatan agregat, dan lapangan kerja.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya secara konsisten telah menunjukkan manfaat kenaikan cukai tembakau dalam mengurangi angka merokok, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperkuat pendapatan negara, dan menghasilkan dampak makroekonomi yang positif, pasar rokok dan sistem cukai di Indonesia terus mengalami peningkatan. Perubahan terkini dalam pola produksi rokok, penyederhanaan struktur layer cukai rokok, serta ketersediaan data terbaru menuntut dilakukannya analisis terkini terhadap dampak makroekonomi dari cukai hasil tembakau.

3
DATA

Penelitian ini menggunakan Tabel Input-Output (IO) 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kerangka analisis utama. Tabel IO asli, yang terdiri dari 185 sektor ekonomi, diagregasi menjadi 52 sektor menggunakan tabel konkordansi, yang menggabungkan industri-industri terperinci ke dalam kelompok sektoral yang lebih luas berdasarkan klasifikasi sektor BPS; misalnya, sektor tanaman pangan individual seperti produksi beras, jagung, dan kedelai diagregasi menjadi satu sektor pertanian. Tingkat agregasi ini diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2025 yang digunakan sebagai total kontrol, yang hanya tersedia pada tingkat 52 sektor.

Meskipun tabel IO 2020 menyediakan struktur input-output acuan terbaru yang tersedia untuk Indonesia, tabel tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan skala dan komposisi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, kami memperbarui tabel IO 2020 yang terdiri dari 52 sektor untuk menggambarkan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 dengan menggunakan metode RAS, yaitu prosedur untuk memperbarui matriks IO yang ada agar mencerminkan kondisi agregat ekonomi baru sambil mempertahankan struktur dasar tabel acuan [23]. Pembaruan ini menggunakan data ekonomi tahun 2025 sebagai total target untuk menyesuaikan penjualan dan penggunaan input di seluruh sektor. Tabel IO tahun 2025 yang dihasilkan memberikan estimasi terbaru mengenai agregat ekonomi utama, termasuk output sektoral, nilai tambah bruto, konsumsi rumah tangga, pendapatan tenaga kerja, lapangan kerja, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Tabel 2 merangkum sumber data dan variabel yang digunakan untuk memperbarui tabel IO tahun 2020.

Tabel 2. Sumber data untuk memperbarui tabel IO tahun 2020

No.	Data	Tahun	Sumber	Penggunaan
1.	PDB menurut sektor (52 sektor) berdasarkan harga pasar saat ini	2025	Badan Pusat Statistik Indonesia	Memperbarui nilai tambah menurut sektor
2.	PDB menurut pengeluaran berdasarkan harga pasar saat ini	2025	Badan Pusat Statistik Indonesia	Memperbarui nilai total impor dan permintaan akhir
3.	Statistik tenaga kerja Indonesia	2025	Badan Pusat Statistik Indonesia	Memperbarui data ketenagakerjaan dan pendapatan
4.	Data produksi rokok	2024 (Okt)	Kementerian Keuangan	Mendekonstruksi data sektor rokok

Sumber: Disusun oleh penulis

Untuk menggambarkan struktur keragaman industri rokok Indonesia dengan lebih baik, sektor rokok yang semula digabungkan kemudian dipisahkan menjadi tiga subsektor yang mewakili SKM, SKT, dan SPM. Pemisahan ini terutama didasarkan pada data produksi rokok dan pangsa pasar yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, sehingga model tersebut dapat secara eksplisit membedakan ketiga kategori rokok yang relevan dengan kebijakan ini, yang digunakan dalam sistem cukai rokok di Indonesia.

Pembentukan ketiga subsektor rokok tersebut juga mengintegrasikan informasi dari studi Bank Dunia tahun 2018 mengenai aspek ekonomi cukai tembakau dan ketenagakerjaan di Indonesia [6]. Secara khusus, bukti mengenai distribusi lapangan kerja di seluruh produksi SKM, SKT, dan SPM digunakan untuk menggambarkan intensitas tenaga kerja di setiap subsektor rokok dalam kerangka input-output yang terpisah. Dengan menggabungkan data produksi terbaru dari Kementerian Keuangan dengan bukti mengenai karakteristik lapangan kerja, gambaran yang lebih representatif mengenai industri manufaktur rokok di Indonesia dapat diperoleh, sekaligus menjaga konsistensi dengan tabel input-output acuan.

Setelah dilakukan disagregasi pada sektor manufaktur rokok, basis data input-output akhir yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 55 sektor ekonomi, yang mencakup 52 sektor agregat dari tabel input-output acuan BPS serta tiga subsektor manufaktur rokok (SKM, SKT, dan SPM). Representasi sektoral yang lebih komprehensif ini memungkinkan model untuk mensimulasikan dampak reformasi–yang mencakup kenaikan dan simplifikasi *layer*–cukai tembakau terhadap keseluruhan perekonomian secara terpisah pada ketiga kategori rokok utama tersebut.

Untuk mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap harga rokok dan pendapatan negara, penelitian ini menggabungkan beberapa sumber data. Tarif cukai rokok diperoleh dari Peraturan Menteri Keuangan terbaru (PMK No. 97 Tahun 2024), yang menetapkan tarif cukai yang berlaku untuk setiap layer cukai rokok. Harga jual rokok (Harga Transaksi Pasar, HTP) diperoleh dari dataset pemantauan harga rokok yang dikumpulkan oleh CHED ITB Ahmad Dahlan pada tahun 2023 dan kemudian disesuaikan dengan inflasi untuk mencerminkan estimasi harga jual rata-rata pada tahun 2025 untuk setiap jenis rokok dan tingkatan cukai. Karena tidak adanya data penjualan yang tersedia untuk umum yang dipisahkan berdasarkan tingkatan cukai rokok, data produksi rokok tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai proksi untuk penjualan rokok domestik. Tabel 3 merangkum tarif cukai rokok, harga transaksi pasar , dan volume produksi yang digunakan dalam simulasi.

Tabel 3. Data rokok

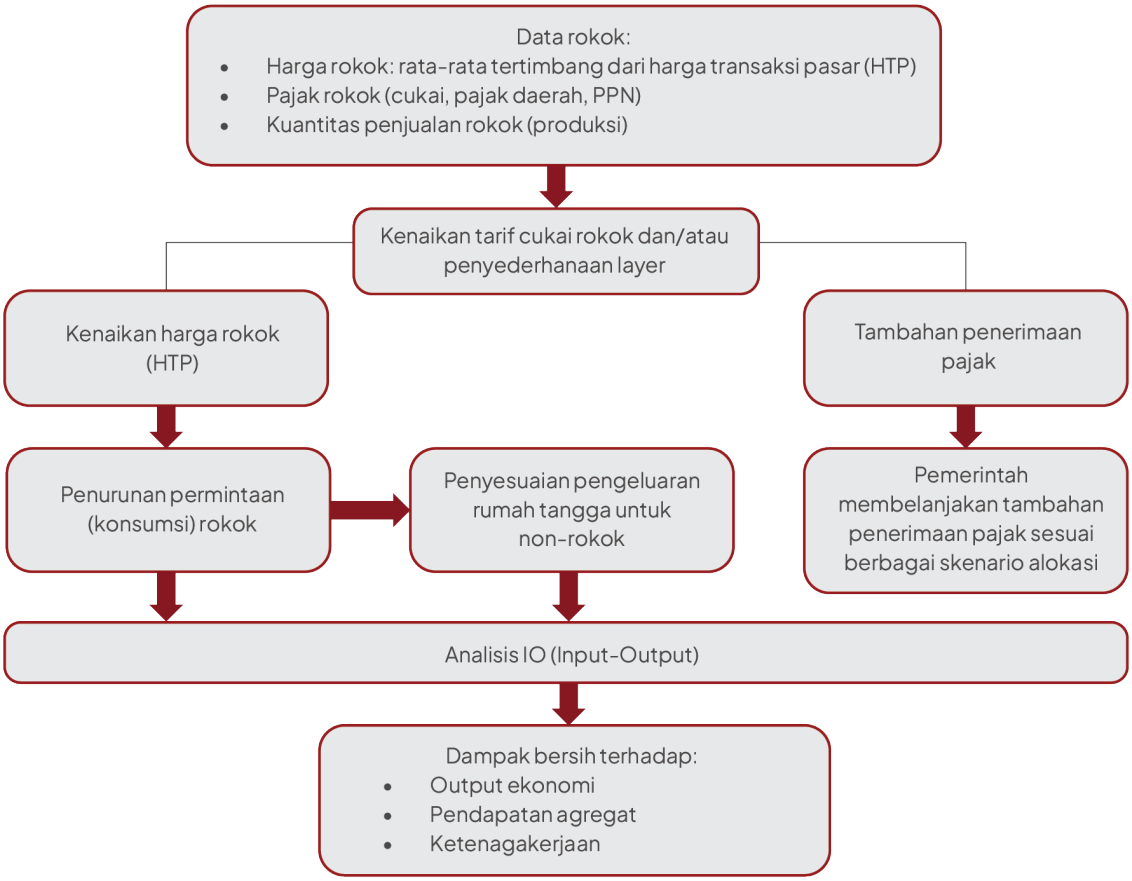
Jenis	Tingkatan	Tarif Cukai (Rp/batang)	Rata-rata harga eceran (Rp/batang)	Jumlah produksi (Jutaan batang)
Rokok putih mesin (Sigaret Putih Mesin, SPM)	I	1.336	2.199	3
	II	794	1.591	6
Rokok kretek mesin (Sigaret Kretek Mesin, SKM)	I	1.231	2.175	97
	II	746	1.370	70
Rokok kretek linting tangan (Sigaret Kretek Tangan, SKT)	IA	483	1.837	19
	IB	378	1.444	41
	II	223	1.187	15
	III	122	898	67

Sumber: Data pemantauan harga rokok dari CHED ITB Ahmad Dahlan (2023; disesuaikan dengan inflasi hingga tahun 2025); Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Tembakau; dan data produksi rokok dari Kementerian Keuangan (Oktober 2024).

4
KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap perekonomian secara keseluruhan, yaitu terhadap output ekonomi, pendapatan agregat rumah tangga, lapangan kerja, dan pendapatan pemerintah, dengan menggunakan kerangka model Input-Output (IO). Gambar 3 mengilustrasikan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari empat langkah utama. Pertama, skenario cukai rokok diterjemahkan menjadi perubahan harga rokok dan pendapatan cukai pemerintah. Kedua, perubahan harga yang dihasilkan digunakan untuk mengestimasi perubahan konsumsi rokok berdasarkan elastisitas permintaan rokok. Ketiga, perubahan pengeluaran rumah tangga untuk rokok diasumsikan memicu penyesuaian dalam pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa non-rokok. Keempat, pendapatan tambahan pemerintah yang dihasilkan dari kenaikan cukai rokok diasumsikan untuk dialokasikan kembali ke pengeluaran pemerintah sesuai dengan skenario pengeluaran pemerintah yang telah ditentukan.

Gambar 3. Kerangka analisis



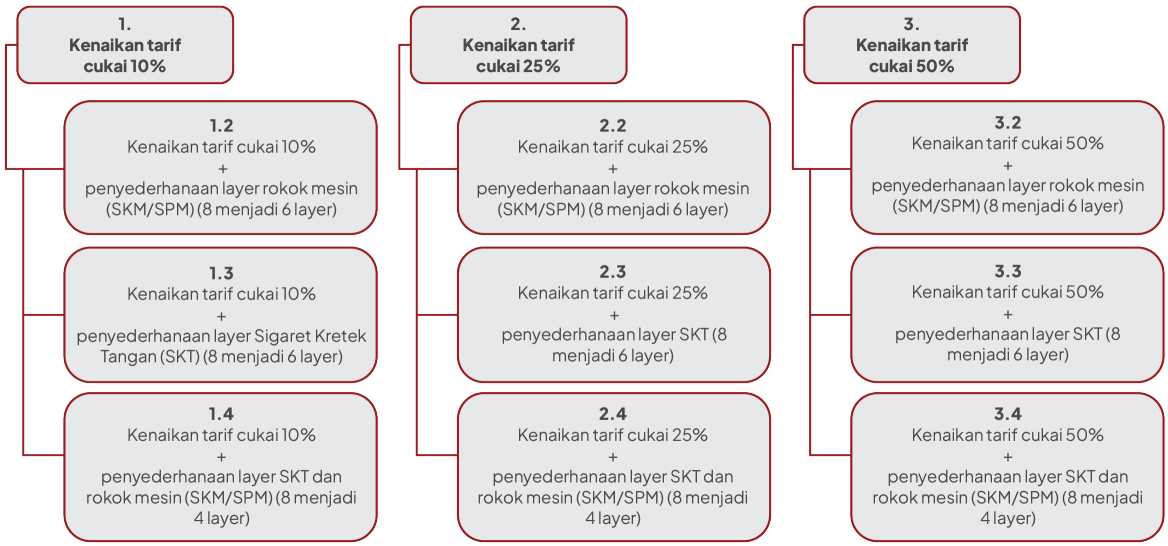
Kenaikan cukai rokok memengaruhi perekonomian melalui tiga saluran transmisi utama: (1) perubahan konsumsi rokok, (2) penyesuaian pengeluaran rumah tangga, dan (3) pengeluaran pemerintah tambahan yang dibiayai oleh peningkatan penerimaan dari cukai rokok. Saluran-saluran ini menimbulkan perubahan dalam permintaan akhir di berbagai sektor industri, yang kemudian menyebar ke seluruh perekonomian melalui keterkaitan antarsektor yang ditangkap oleh kerangka Input-Output. Dampak yang terjadi di seluruh perekonomian dievaluasi menggunakan model Input-Output 55 sektor yang telah diperbarui untuk mengestimasi dampak kenaikan cukai rokok terhadap output total, pendapatan agregat rumah tangga, dan lapangan kerja di bawah skenario kebijakan alternatif.

4.1 Estimasi Perubahan Harga Rokok

Tahap pertama analisis ini menerjemahkan berbagai opsi reformasi cukai rokok menjadi perubahan harga jual rokok. Pertama, analisis ini menetapkan serangkaian skenario reformasi cukai rokok hingga kemudian mengestimasi perubahan harga jual rokok yang diakibatkannya, yang berfungsi sebagai input utama untuk mengestimasi perubahan permintaan.

Gambar 4 menyajikan skenario reformasi cukai rokok yang dievaluasi dalam penelitian ini. Analisis ini mempertimbangkan 12 skenario kebijakan, yang menggabungkan dua dimensi reformasi: perubahan tarif cukai rokok dan simplifikasi struktur *layer* cukai rokok. Tiga kenaikan tarif cukai–10%, 25%, dan 50%–dievaluasi berdasarkan empat struktur cukai alternatif: (1) tanpa penyederhanaan *layer*, (2) penyederhanaan *layer* rokok mesin (SKM dan SPM), (3) penyederhanaan tingkatan rokok linting tangan (SKT), dan (4) penyederhanaan simultan tingkatan rokok mesin dan rokok linting tangan. Desain ini memungkinkan analisis untuk mengevaluasi baik efek independen dari kenaikan tarif cukai rokok maupun penyederhanaan struktur tingkatan cukai, serta efek gabungan keduanya.

Gambar 4. Skenario reformasi cukai rokok



Untuk setiap skenario kebijakan, harga jual rokok disimulasikan berdasarkan tingkatan tarif cukai rokok masing-masing. Harga jual diperkirakan sebagai penjumlahan dari harga produsen setelah dikurangi cukai (*net-of-tax price,* NT), cukai rokok (*excise,* E), pajak rokok provinsi (LT), dan pajak pertambahan nilai (PPN), sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (1) berikut ini:

$$P_{ik} = NT_{ik} + E_{ik} + LT_{ik} + VAT_{ik} \qquad (1)$$

Di mana i melambangkan jenis rokok (SKM, SKT, dan SPM), sedangkan k melambangkan tingkatan tarif cukai dalam setiap jenis rokok. Analisis ini mengasumsikan penyesuaian harga rokok sebesar 100% sesuai kenaikan cukai, yang berarti bahwa setiap kenaikan cukai rokok sepenuhnya tercermin dalam harga eceran rokok. Harga produsen setelah dikurangi pajak diasumsikan tetap konstan di seluruh skenario kebijakan. Pajak rokok provinsi dihitung ulang sebesar 10% dari cukai rokok yang berlaku, sedangkan komponen pajak pertambahan nilai dihitung sebesar 9,9% dari harga jual eceran tembakau (HJE). Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan pada semua komponen pajak tetap konsisten secara internal dengan sistem perpajakan rokok di Indonesia.

Selanjutnya, harga jual yang disimulasikan tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan harga jual rata-rata tertimbang bagi setiap jenis rokok dengan menggunakan pangsa produksi dari setiap tingkatan tarif cukai (w_{ik}) sebagai bobot, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (2) berikut ini:

$$\bar{P}_i^{\,s} = \sum_{k=1}^{K_i} w_{ik} P_{ik}^{s} \qquad (2)$$

Dalam skenario penyederhanaan *layer* tarif cukai, layer tarif yang lebih rendah diasumsikan digabungkan dengan *layer* tarif yang lebih tinggi yang berdekatan, sehingga dikenakan tarif cukai pada layer yang lebih tinggi tersebut. Untuk rokok mesin, *layer* SKM I digabungkan dengan SPM I, sedangkan SKM II digabungkan dengan SPM II. Sementara itu, untuk rokok kretek linting tangan, *layer* SKT 1B digabungkan dengan SKT 1A, sedangkan SKT III digabungkan dengan SKT II. Dalam penghitungan estimasi harga eceran rata-rata tertimbang berdasarkan struktur *layer* tarif yang telah disederhanakan, pangsa produksi diasumsikan tetap sama seperti distribusi sebelum reformasi.

Pada akhirnya, perubahan persentase harga jual rata-rata tertimbang diperkirakan dengan membandingkan harga jual rata-rata tertimbang yang disimulasikan pada setiap skenario reformasi dengan harga eceran dasar yang sesuai, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (3) sebagai berikut:

$$\Delta P_i = \left(\frac{\bar{P}_i^{\,s} - \bar{P}_i^{\,0}}{\bar{P}_i^{\,0}} \right) \times 100\% \qquad (3)$$

Hasil estimasi persentase perubahan harga jual rata-rata tertimbang merupakan input utama untuk mengestimasi perubahan permintaan rokok sebagaimana dijelaskan dalam subbagian berikutnya.

4.2 Estimasi Perubahan dalam Permintaan

Estimasi perubahan harga rokok selanjutnya diterjemahkan menjadi perubahan permintaan rokok. Karena perubahan harga pada satu jenis rokok tidak hanya memengaruhi permintaannya sendiri, tetapi juga dapat mengubah permintaan terhadap jenis rokok lain melalui efek substitusi, maka perubahan permintaan dihitung sebagai fungsi dari elastisitas harga sendiri (*own-price elasticity*) dan elastisitas harga silang *(cross price elasticity)* terhadap jenis rokok lain, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (4):

$$\%\Delta Q_i = \underbrace{\varepsilon_{ii}\%\Delta P_i}_{\text{Own-price effect}} + \underbrace{\sum_{j\neq i}\varepsilon_{ij}\%\Delta P_j}_{\text{Cross-price effects}} \quad (4)$$

di mana $\%\Delta Q_i$ menunjukkan persentase perubahan permintaan untuk jenis rokok i, $\%\Delta P_i$ menunjukkan persentase perubahan harga jenis rokok i, $\%\Delta P_j$ menunjukkan persentase perubahan harga jenis rokok lainnya ($j \neq i$), ε_{ii} mewakili elastisitas permintaan terhadap harga sendiri untuk jenis rokok i, dan ε_{ij} mewakili elastisitas silang antara jenis rokok i dan j. Perkiraan elastisitas harga sendiri dan elastisitas harga silang yang digunakan dalam analisis utama diadopsi dari studi input-output CISDI tahun 2021 [7], yang mengestimasi elastisitas permintaan rokok menggunakan data gabungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia tahun 2017–2019 dan metode Deaton [23,24]. Penelitian sebelumnya mengestimasi elastisitas permintaan untuk dua kategori rokok, yaitu rokok kretek dan rokok putih (SPM), yang menjadi dasar untuk menerjemahkan perubahan harga eceran yang disimulasikan menjadi perubahan permintaan rokok.

Karena penelitian ini membagi pasar rokok menjadi tiga kategori, yaitu kretek buatan mesin (SKM), kretek linting tangan (SKT), dan rokok putih (SPM), maka estimasi elastisitas dari penelitian sebelumnya dipetakan ke dalam kategori rokok terperinci yang digunakan dalam model input-output. Secara khusus, estimasi elastisitas harga sendiri untuk rokok kretek diasumsikan berlaku sama untuk SKM dan SKT, sedangkan estimasi elastisitas harga sendiri untuk rokok putih diterapkan pada SPM. Demikian pula, estimasi elastisitas silang antara rokok kretek dan rokok putih diasumsikan mewakili substitusi antara SPM dengan SKM dan SKT. Karena penelitian sebelumnya tidak mengestimasi substitusi antara SKM dan SKT, penelitian ini menetapkan parameter elastisitas harga silang *(cross-price elasticity)* untuk kedua jenis rokok tersebut dengan menggunakan pendekatan berbasis skenario. Sebagai dua kategori rokok terbesar di Indonesia, SKM dan SKT cenderung saling menggantikan daripada beralih ke rokok putih, sehingga elastisitas silang diasumsikan lebih besar daripada elastisitas silang antara masing-masing kategori dengan rokok putih. Asumsi elastisitas yang digunakan dalam simulasi utama disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Own-price and Cross-price Elasticities Used in the Main Analysis

Permintaan rokok:	Harga SPM	Harga SKM	Harga SKT
SPM	-0,338	0,163	0,163
SKM	0,163	-0,800	0,350
SKT	0,163	0,350	-0,800

Catatan: Elastisitas harga sendiri untuk SKM dan SKT diasumsikan sama dan mengikuti nilai elastisitas yang diperkirakan untuk rokok kretek dari studi dampak makroekonomi CISDI tahun 2021. Elastisitas harga sendiri untuk SPM mengikuti elastisitas yang diperkirakan untuk rokok putih. Elastisitas silang antara rokok kretek dan rokok putih yang diperkirakan dalam studi sebelumnya diasumsikan mewakili substitusi antara SPM dan baik SKM maupun SKT. Karena substitusi antara SKM dan SKT tidak diperkirakan dalam studi sebelumnya, elastisitas silang yang sesuai (0,35) untuk analisis utama.

Untuk menilai ketahanan (*robustness*) temuan tersebut, analisis sensitivitas dilakukan dengan memvariasikan baik elastisitas harga sendiri maupun elastisitas silang SKM–SKT yang telah dikalibrasi. Secara khusus, asumsi elastisitas batas bawah, skenario dasar, dan batas atas dievaluasi untuk menguji sensitivitas hasil simulasi terhadap estimasi alternatif mengenai responsivitas harga konsumen. Selain itu, kami memperkirakan ulang elastisitas harga permintaan rokok menggunakan gabungan data Susenas periode 2017–2024 untuk menangkap perilaku rumah tangga terkini dan memeriksa apakah responsivitas permintaan rokok telah berubah seiring waktu. Meskipun perkiraan yang diperbarui ini memberikan pemeriksaan ketahanan yang substansial, perkiraan tersebut menunjukkan elastisitas harga permintaan yang jauh lebih tinggi daripada yang umumnya dilaporkan dalam literatur ekonomi tembakau yang lebih luas, di mana permintaan rokok umumnya ditemukan bersifat inelastis terhadap harga [25]. Mengingat adanya perbedaan dari literatur empiris yang ada, estimasi yang diperbarui ini tidak digunakan dalam analisis utama. Sebaliknya, simulasi utama tetap mengandalkan estimasi elastisitas dari studi makroekonomi CISDI sebelumnya. Analisis sensitivitas elastisitas disajikan dalam Lampiran 2.

4.3 Estimasi Tambahan Pendapatan Pemerintah

Setelah dilakukan estimasi perubahan permintaan rokok, penerimaan pemerintah tambahan yang dihasilkan dalam setiap skenario reformasi cukai rokok dihitung. Penerimaan tambahan tersebut mencerminkan efek gabungan dari perubahan tarif cukai dan perubahan konsumsi rokok pascareformasi cukai. Karena simulasi tersebut secara eksplisit memperhitungkan penurunan konsumsi rokok akibat kenaikan harga rokok, perkiraan kenaikan penerimaan pemerintah mencerminkan baik kenaikan jumlah cukai yang dipungut per batang rokok maupun berkurangnya jumlah batang rokok yang dikonsumsi.

Penerimaan tambahan dari cukai diestimasi dengan membandingkan pendapatan cukai pada setiap skenario reformasi dengan pendapatan cukai pada skenario dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam Persamaan (5):

$$\Delta TR = \sum_i \left(\tau_i^{new} Q_i^{after} - \tau_i^0 Q_i^0 \right) \qquad (5)$$

di mana ΔTR menunjukkan tambahan penerimaan cukai pemerintah, τ_i^{new} mewakili besaran cukai per batang untuk jenis rokok i dalam skenario reformasi, τ_i^0 mewakili besaran cukai per batang pada kondisi dasar, Q_i^{after} menunjukkan konsumsi rokok setelah reformasi cukai , dan Q_i^0 menunjukkan konsumsi rokok pada kondisi dasar (baseline).

Perhitungan dilakukan secara terpisah untuk setiap kategori rokok (SKM, SKT, dan SPM), dengan konsumsi rokok pascareformasi diperoleh dari estimasi permintaan yang dijelaskan pada subbagian sebelumnya. Tambahan penerimaan pemerintah dari cukai kemudian dijumlahkan dari seluruh kategori rokok untuk memperoleh perubahan total penerimaan cukai pemerintah dalam setiap skenario reformasi cukai.

4.4 Analisis Input Output (IO)

Analisis Input-Output (IO) adalah kerangka kerja makroekonomi yang memodelkan ketergantungan antarsektor dalam suatu perekonomian. Dalam kerangka kerja IO, output dari satu sektor berfungsi sebagai input antara bagi sektor-sektor lain sekaligus berkontribusi terhadap permintaan akhir dari rumah tangga, pemerintah, investasi, dan ekspor. Berbeda dengan pendekatan berbasis regresi, yang dirancang untuk memperkirakan hubungan empiris dari data yang diamati, kerangka kerja IO dirancang untuk mensimulasikan konsekuensi skenario kebijakan alternatif terhadap seluruh perekonomian dengan melacak bagaimana perubahan dalam permintaan akhir menyebar melalui keterkaitan antar sektor. Akibatnya, perubahan dalam permintaan akhir suatu sektor menimbulkan efek berganda ke seluruh perekonomian seiring dengan penyesuaian produksi di seluruh sektor yang saling terhubung.

Dalam penelitian ini, estimasi perubahan konsumsi rokok dan tambahan penerimaan pemerintah dari cukai yang dihasilkan dalam setiap skenario reformasi merupakan guncangan ekonomi yang dimasukkan ke dalam model IO, sehingga memungkinkan estimasi dampaknya terhadap output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Istilah-istilah utama yang digunakan sepanjang analisis IO terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Istilah-istilah pada model Input Output

Istilah	Definisi
Tabel IO	Tabel yang merangkum ketergantungan antar sektor dalam perekonomian, yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan (output) oleh suatu sektor dan digunakan oleh sektor lain sebagai input.
Koefisien Teknis	Jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output
Permintaan Terakhir	Penggunaan output untuk konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Efek awal	Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output, pendapatan, dan lapangan kerja sektor tersebut.
Efek langsung	Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output, pendapatan, dan lapangan kerja di sektor-sektor pemasok.

Istilah	Definisi
Efek tidak langsung	Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output, pendapatan, dan lapangan kerja di sektor-sektor yang menyediakan input bagi para pemasok.
Pengganda sederhana (Tipe I)	Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output total, pendapatan, dan lapangan kerja dalam perekonomian. Pengganda Tipe I = Efek awal + Efek langsung + Efek tidak langsung.
Efek yang disebabkan oleh konsumsi	Dampak perubahan permintaan akhir suatu sektor yang disebabkan oleh perubahan pendapatan dan konsumsi rumah tangga.
Pengganda total (Tipe II)	Pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output total, pendapatan agregat, dan lapangan kerja dalam perekonomian. Pengganda Tipe II = Pengganda Tipe I + Efek yang ditimbulkan oleh konsumsi.

Sumber: Disusun oleh penulis

4.5 Estimasi Dampak Makroekonomi

Untuk mengestimasi dampak makroekonomi dari reformasi cukai rokok, penelitian ini melakukan serangkaian simulasi yang menggambarkan tiga saluran transmisi ekonomi yang menjadi jalur pengaruh reformasi terhadap perekonomian: (1) penurunan konsumsi rokok, (2) penyesuaian pengeluaran rumah tangga, dan (3) pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh tambahan penerimaan dari cukai. Dampak makroekonomi secara keseluruhan diperoleh dengan menggabungkan efek dari saluran-saluran transmisi tersebut di bawah setiap skenario reformasi cukai . Tabel 6 merangkum simulasi makroekonomi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Tabel 6. Simulasi makroekonomi

Simulasi	Saluran transmisi ekonomi	Deskripsi
Simulasi A	Penurunan konsumsi rokok	Mengestimasi dampak penurunan konsumsi rokok sebagai akibat dari reformasi cukai rokok.
Simulasi B	Penyesuaian pengeluaran rumah tangga	Mengestimasi dampak penyesuaian pengeluaran rumah tangga untuk barang-barang selain rokok, khususnya melalui efek penggeseran pengeluaran *(crowding-out)* terhadap komoditas selain rokok berdasarkan struktur konsumsi rumah tangga acuan. Dampak alokasi pendapatan pemerintah tidak diperhitungkan.

Simulasi	Saluran transmisi ekonomi	Deskripsi
Simulasi C hingga E	Realokasi penerimaan tambahan pemerintah	Simulasi C1 hingga E2 mengestimasi dampak pengeluaran pemerintah dari tambahan penerimaan dari cukai rokok berdasarkan berbagai skenario pengeluaran. Perlu dicatat bahwa dampak yang diperkirakan dalam simulasi-simulasi ini tidak mencakup dampak dari simulasi A dan B.
Simulasi C	Realokasi anggaran ke belanja operasional rutin	• Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan PRD**, sisa penerimaan cukai yang bersifat diskresioner dialokasikan secara proporsional sesuai dengan struktur belanja pemerintah dasar yang tercantum dalam tabel Input-Output. • Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti pola belanja operasional rutin *(business as usual)*.
Simulasi D	D.I Realokasi ke sektor kesehatan dan promosi kesehatan	• Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan PRD**, sisa pendapatan cukai yang dapat dialokasikan secara diskresioner dialokasikan ke sektor-sektor yang berkaitan dengan kesehatan, termasuk layanan kesehatan publik dan swasta, produk farmasi, dan peralatan medis, serta kampanye pengendalian tembakau melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) • Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti pola belanja operasional rutin.
	D.II Realokasi ke pembiayaan kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan	• Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan PRD**, sisa penerimaan cukai diskresioner dialokasikan ke sektor-sektor terkait kesehatan yang sama seperti pada D.I, namun lebih difokuskan pada pembiayaan kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan secara langsung, terutama melalui porsi yang lebih besar untuk JKN dan layanan kesehatan publik, sementara alokasi untuk produk farmasi, industri peralatan medis, dan kampanye pengendalian tembakau dikurangi. • Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti pola belanja operasional rutin.

Simulasi	Saluran transmisi ekonomi	Deskripsi
Simulasi E	Realokasi ke program-program perlindungan sosial	• Setelah alokasi wajib untuk DBH CHT* dan PRD**, sisa pendapatan cukai yang dapat dialokasikan secara diskresioner dialokasikan untuk program-program perlindungan sosial dan sektor-sektor terkait, termasuk bantuan pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. • Pendapatan PPN tambahan tetap mengikuti pola belanja operasional rutin.
Dampak Keseluruhan	Dampak makroekonomi - bersih	Diestimasi dengan menggabungkan dampak dari Simulasi A dan B dengan salah satu skenario pengeluaran pemerintah (Simulasi C, D.I, D.II, atau E).

Catatan:
* Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) setara dengan 3 persen dari penerimaan cukai rokok dalam negeri. Berdasarkan peraturan yang berlaku, 50 persen DBH CHT dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk program-program kesehatan.
** Pajak rokok provinsi (PRD) dikenakan sebesar 10 persen dari penerimaan cukai rokok. Dari penerimaan pajak rokok provinsi tersebut, 37,5 persen dialokasikan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setidaknya 7,5 persen untuk layanan kesehatan lainnya, dan hingga 5 persen untuk penegakan hukum.

Simulasi A menggambarkan penurunan konsumsi rokok yang terjadi secara langsung sebelum rumah tangga mengalokasikan kembali tabungan yang dihasilkan dari berkurangnya pengeluaran untuk rokok. Simulasi B memperkirakan dampak dari penyesuaian pengeluaran rumah tangga. Dalam analisis kami, pendapatan rumah tangga diasumsikan tetap konstan, sehingga peningkatan pengeluaran untuk rokok akan bergeser atau pengeluaran untuk komoditas non-rokok berkurang. Penyesuaian pengeluaran non-rokok yang dihasilkan didistribusikan ke berbagai komoditas secara proporsional sesuai dengan struktur konsumsi rumah tangga dasar yang tercantum dalam tabel IO. Oleh karena itu, efek gabungan dari Simulasi A dan B mewakili dampak bersih dari perubahan pengeluaran rumah tangga setelah reformasi cukai rokok.

Dampak pengeluaran pemerintah dievaluasi melalui Simulasi C, D.I, D.II, dan E. Di seluruh skenario pengeluaran pemerintah, penerimaan tambahan pemerintah terlebih dahulu dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai alokasi khusus cukai rokok sebelum asumsi pengeluaran alternatif apa pun diterapkan. Hal ini mencakup alokasi wajib sebesar 3 persen dari pendapatan cukai rokok tambahan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Berdasarkan peraturan ini, DBH CHT dialokasikan sebesar 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen

untuk penegakan hukum, dan 40 persen untuk program kesehatan [25].

Jumlah tersebut juga mencakup Pajak Rokok Daerah (PRD), yang dikenakan sebesar 10 persen dari penerimaan cukai rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. Dari 10 persen tersebut, 2,5 poin persentase dialokasikan kepada pemerintah pusat untuk keperluan penegakan hukum, sedangkan 7,5 poin persentase sisanya disalurkan kepada pemerintah provinsi, di mana 37,5 persennya digunakan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setidaknya 7,5 persen dialokasikan untuk layanan kesehatan lainnya, dan hingga 5 persen dialokasikan untuk penegakan hukum di tingkat daerah [26].

Karena penerapan ketentuan peraturan tersebut ke dalam sektor-sektor Input-Output yang sesuai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan itu sendiri, kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang tercantum di dalamnya disesuaikan dengan sektor-sektor Input-Output yang paling relevan. Pendapatan PPN tambahan diasumsikan akan terus mengikuti pola pengeluaran pemerintah dasar yang tergambar dalam tabel Input-Output (skenario *business as usual*). Setelah alokasi wajib ini terpenuhi, sisa pendapatan cukai diskresioner dialokasikan sesuai dengan asumsi yang ditetapkan dalam setiap skenario pengeluaran pemerintah.

.

5
HASIL

5.1 Hubungan Antarsektor antara Sektor Rokok dan Sektor Lainnya

Bagian ini menguraikan keterkaitan ekonomi antara sektor rokok dan sektor-sektor lain dalam perekonomian Indonesia berdasarkan analisis Input-Output (IO). Pembahasan dimulai dengan memaparkan penjelasan mengenai struktur input sektor rokok, dilanjutkan dengan pengganda output, pendapatan, dan tenaga kerja, serta sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan permintaan rokok.

5.1.1 Struktur Input-Output pada Sektor Rokok

Sektor rokok menghasilkan output sebesar Rp272,56 triliun pada tahun 2025. Struktur inputnya disajikan pada Tabel 7a. Untuk menghasilkan satu unit output, sektor ini membutuhkan 0,353 unit (35,3%) input antara dalam negeri dan 0,057 unit (5,7%) input impor, sedangkan sisanya sebesar 0,590 unit (59,0%) merupakan nilai tambah. Di sisi output, hampir seluruh produksi rokok ditujukan untuk permintaan akhir–terutama konsumsi rumah tangga–dengan hanya sebagian kecil yang digunakan sebagai input antara oleh industri lain (Tabel 7b). Akibatnya, sektor rokok menunjukkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang sangat terbatas dalam perekonomian, yang berarti bahwa perubahan dalam produksi rokok menghasilkan output tambahan yang relatif kecil di industri hilir.

Table 7a. Struktur input-output pada sektor rokok (input)

	Nilai (triliun rupiah)	Persentase dari total input (%)
Input Antara		35,3%
Pertanian	40,77	
Industri	28,70	
Jasa	26,85	
Impor (input antara yang diimpor)	15,52	5,7%
Nilai tambah (upah, surplus, pajak bersih lainnya atas produksi)	160,72	59,0%
Nilai total input	272,56	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan analisis IO.

Table 7b. Struktur input-output pada sektor rokok (output)

	Nilai (triliun rupiah)	Persentase dari total output (%)
Permintaan antara (dijual ke industri lain)	5,63	2,1
Konsumsi rumah tangga	249,03	91,4
Perubahan inventaris	3,67	1,3
Ekspor barang	13,74	5,0
Ekspor jasa	0,49	0,2
Nilai total output	272,56	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan analisis IO.

5.1.2 Pengganda Output

Pengganda output mengukur perubahan total dalam output seluruh perekonomian yang dihasilkan oleh perubahan sebesar satu unit dalam permintaan akhir suatu sektor tertentu. Pengganda output Tipe-I terdiri dari tiga komponen: efek awal, efek langsung, dan efek tidak langsung. Efek awal bernilai satu, yang mencerminkan perubahan langsung pada output sektor tersebut akibat perubahan satu unit dalam permintaan akhir. Efek langsung mencakup output tambahan yang dibutuhkan dari industri-industri yang memasok input antara ke sektor tersebut, sedangkan efek tidak langsung mencerminkan putaran produksi berikutnya yang dihasilkan ketika industri-industri pemasok tersebut membeli input dari pemasok mereka sendiri.

Tabel 8 menunjukkan bahwa efek langsung sektor rokok sebesar 0,35, yang mengindikasikan bahwa untuk menghasilkan tambahan output rokok sebesar Rp1,00 triliun diperlukan sekitar Rp353 miliar input antara dari sektor hulu. Sebaliknya, penurunan output rokok sebesar Rp1,00 triliun akan mengurangi permintaan terhadap input antara sebesar jumlah yang sama. Efek tidak langsung diperkirakan sebesar 0,17, yang mencerminkan produksi tambahan yang dihasilkan di sepanjang rantai pasokan hulu. Secara gabungan, efek-efek ini menghasilkan pengganda output Tipe-I sebesar 1,53, yang berarti bahwa setiap kenaikan (penurunan) sebesar Rp1,00 dalam permintaan akhir terhadap produk rokok akan menghasilkan kenaikan (penurunan) sebesar Rp1,53 dalam total output ekonomi.

Pengganda output Tipe-II memperluas pengganda Tipe-I dengan memasukkan efek konsumsi yang ditimbulkan, yang muncul ketika perubahan pendapatan rumah tangga memengaruhi konsumsi rumah tangga dan memicu putaran aktivitas ekonomi tambahan. Untuk sektor rokok, pengganda output Tipe-II sebesar 2,20, yang menunjukkan bahwa setiap tambahan Rp1,00 pada permintaan akhir produk rokok memerlukan Rp2,20 output total di seluruh perekonomian. Sebaliknya, penurunan (kenaikan) permintaan akhir rokok sebesar Rp100 triliun akan mengurangi (meningkatkan) output ekonomi total sekitar Rp220 triliun.

Tabel 8. Pengganda output pada sektor rokok

Jenis Pengganda	Nilai
Efek awal	1,00
Efek langsung	0,35
Efek tidak langsung	0,17
Pengganda Tipe-I	1,53
Efek yang dipicu oleh konsumsi	0,67
Pengganda Tipe-II	2,20

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

Tabel 9 menyajikan lima sektor yang paling terpengaruh oleh perubahan produksi rokok. Selain sektor rokok itu sendiri, yang menyumbang 46,9 persen dari total pengganda output Tipe-II, sektor pertanian (tanaman musiman dan tanaman perkebunan tahunan) termasuk di antara sektor-sektor yang paling terpengaruh karena menyediakan porsi yang signifikan dari input antara yang digunakan dalam produksi rokok. Sektor-sektor lain yang mengalami dampak limpahan (*spillover effect*) yang relatif besar meliputi industri makanan dan minuman, perdagangan grosir dan eceran, serta informasi dan komunikasi. Sektor-sektor ini terpengaruh baik melalui hubungan pasokan langsung dengan sektor rokok maupun melalui hubungan produksi dan konsumsi yang lebih luas yang ditangkap oleh pengganda Tipe-II.

Tabel 9. Lima sektor teratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok berdasarkan pengganda output Tipe-II

Sektor	Kontribusi terhadap faktor pengganda (%)
Sektor rokok	46,9%
Tanaman perkebunan musiman dan tahunan	9,4%
Industri makanan dan minuman	6,2%
Perdagangan grosir dan eceran	5,1%
Informasi dan komunikasi	2,9%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

5.1.3 Pengganda Pendapatan

Pengganda pendapatan mengukur perubahan total pendapatan agregat rumah tangga yang dihasilkan oleh perubahan satu unit dalam output suatu sektor tertentu. Tabel 10 menyajikan pengganda pendapatan sektor rokok di Indonesia. Penurunan produksi rokok sebesar Rp1,00

triliun secara langsung mengurangi pendapatan rumah tangga di dalam sektor rokok sebesar Rp153 miliar (efek awal). Penurunan produksi tersebut juga menurunkan pendapatan di industri pemasok hulu sebesar Rp78 miliar (efek langsung), sementara putaran produksi berikutnya mengurangi pendapatan di sektor-sektor yang lebih hulu sebesar tambahan Rp36 miliar (efek tidak langsung). Setelah memperhitungkan efek konsumsi yang ditimbulkan, pengganda pendapatan Tipe-II diperkirakan sebesar 0,40, yang menunjukkan bahwa setiap penurunan (kenaikan) sebesar Rp1,00 triliun dalam output rokok akan mengurangi (meningkatkan) pendapatan rumah tangga agregat sekitar Rp400 miliar.

Tabel 10. Pengganda pendapatan pada sektor rokok

Jenis Pengganda	Nilai
Efek awal	0,15
Efek langsung	0,08
Efek tidak langsung	0,04
Pengganda Tipe-I	0,27
Efek yang dipicu oleh konsumsi	0,13
Pengganda Tipe-II	0,40

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

Tabel 11 mengidentifikasi sektor-sektor di mana perubahan pendapatan rumah tangga paling terkonsentrasi sebagai akibat dari perubahan produksi rokok. Selain sektor rokok itu sendiri, yang mengalami dampak pendapatan terbesar, pertanian tanaman perkebunan merupakan sektor yang paling terdampak karena keterkaitannya yang kuat di hulu dengan industri manufaktur rokok. Sektor-sektor lain yang mengalami efek pendapatan relatif besar meliputi perdagangan grosir dan eceran, jasa perantara keuangan, serta informasi dan komunikasi.

Tabel 11. Lima sektor teratas yang terdampak oleh perubahan permintaan akhir pada sektor rokok berdasarkan pengganda pendapatan Tipe-II

Sektor	Kontribusi terhadap faktor pengganda (%)
Sektor rokok (efek tersendiri)	39,6%
Tanaman perkebunan musiman dan tahunan	14,5%
Perdagangan grosir dan eceran	8,4%
Layanan perantara keuangan	2,9%
Efek yang dipicu oleh konsumsi	2,8%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

5.1.4 Pengganda Ketenagakerjaan

Pengganda ketenagakerjaan mengukur jumlah lapangan kerja yang tercipta atau hilang dalam perekonomian sebagai akibat dari perubahan satu unit dalam output suatu sektor tertentu. Berbeda dengan pengganda output dan pendapatan, Tabel 12 menyajikan pengganda ketenagakerjaan secara terpisah untuk SKM, SKT, dan SPM karena ketiga subsektor rokok tersebut memiliki tingkat intensitas tenaga kerja yang sangat berbeda. Pengganda tersebut dinyatakan sebagai jumlah lapangan kerja yang terkait dengan setiap Rp1 miliar output. Untuk setiap Rp1 miliar output rokok, pengganda ketenagakerjaan Tipe-II diperkirakan sebesar 10 lapangan kerja untuk SKT, dibandingkan dengan 8 lapangan kerja untuk SPM dan 6 lapangan kerja untuk SKM, yang mencerminkan intensitas tenaga kerja yang jauh lebih tinggi dalam produksi rokok linting tangan.

Tabel 12. Pengganda ketenagakerjaan menurut jenis rokok (jumlah orang per 10 miliar rupiah output)

Jenis pengganda	SKM	SKT	SPM
Efek awal	2	39	21
Efek langsung*	25	25	25
Efek tidak langsung*	8	8	8
Pengganda Tipe-I	35	72	54
Efek yang dipicu oleh konsumsi*	26	26	26
Pengganda Tipe-II	61	98	80

Penulis: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

Catatan: *Efek langsung, tidak langsung, dan yang ditimbulkan oleh konsumsi diasumsikan sama di seluruh SKM, SKT, dan SPM karena data Input-Output khusus subsektor tidak tersedia. Oleh karena itu, ketiga subsektor rokok tersebut diasumsikan memiliki struktur input antara yang sama dan memperoleh pasokan dari pemasok yang sama dalam proporsi yang sama.

Tabel 13 menyajikan komposisi sektoral dari pengganda ketenagakerjaan Tipe-II untuk setiap subsektor rokok. Tanaman perkebunan musiman dan tahunan, pertanian tanaman pangan, perdagangan grosir dan eceran, serta industri pengolahan tembakau secara konsisten muncul sebagai penyumbang terbesar di ketiga subsektor rokok tersebut, yang mencerminkan peran penting mereka dalam rantai pasokan rokok. Efek ketenagakerjaan dari industri rokok itu sendiri menyumbang 40,7 persen dari total pengganda ketenagakerjaan untuk SKT, dibandingkan dengan 27,5 persen untuk SPM dan hanya 4,8 persen untuk SKM. Di antara produk rokok mesin, perbedaan antara SPM dan SKM mencerminkan perbedaan kebutuhan tenaga kerja langsung dalam proses produksinya. SKM menyumbang sekitar 53% dari output sektor rokok (Gambar 2), tetapi hanya sekitar 6% dari total tenaga kerja di sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 miliar output SKM hanya membutuhkan sekitar 0,2 tenaga kerja. Sebaliknya, SPM menyumbang sekitar 3% dari output dan tenaga kerja sektor rokok, dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 2,1 orang untuk setiap Rp1 miliar output. Dengan demikian, dampak langsung SKM terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kecil, sedangkan sebagian besar efek pengganda tenaga kerjanya berasal dari sektor-sektor pemasok. Pola ini sejalan dengan proses produksi rokok kretek linting tangan yang jauh lebih padat karya dibandingkan dengan produksi rokok mesin yang lebih termekanisasi. Namun, dekomposisi

sektoral ini harus ditafsirkan dengan hati-hati, karena didasarkan pada asumsi bahwa SKM, SKT, dan SPM memiliki struktur input produksi yang sama akibat tidak adanya data Input-Output yang spesifik untuk masing-masing subsektor.

Tabel 13. Komposisi sektoral dari pengganda ketenagakerjaan Tipe-II pada subsektor rokok

Sektor	Kontribusi terhadap faktor pengganda		
	SKM	SKT	SPM
Sektor rokok (efek tersendiri)	4,8%	40,7%	27,5%
Tanaman perkebunan musiman dan tahunan	30,5%	19,0%	23,2%
Pertanian tanaman pangan	11,5%	7,2%	8,8%
Perdagangan grosir dan eceran	11,3%	7,0%	8,6%
Industri pengolahan tembakau	11,2%	7,0%	8,5%
Layanan makanan dan minuman	5,1%	3,2%	3,9%
Sektor lainnya	25,5%	15,9%	19,5%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

5.2 Dampak Makroekonomi dari Reformasi Cukai Rokok

Bagian ini menyajikan hasil analisis Input-Output (IO) mengenai dampak makroekonomi dari reformasi cukai rokok terhadap output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Perkiraan tersebut didasarkan pada pengganda Tipe-II yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, yang mencakup baik efek yang dipicu oleh produksi maupun efek yang dipicu oleh konsumsi di seluruh perekonomian.

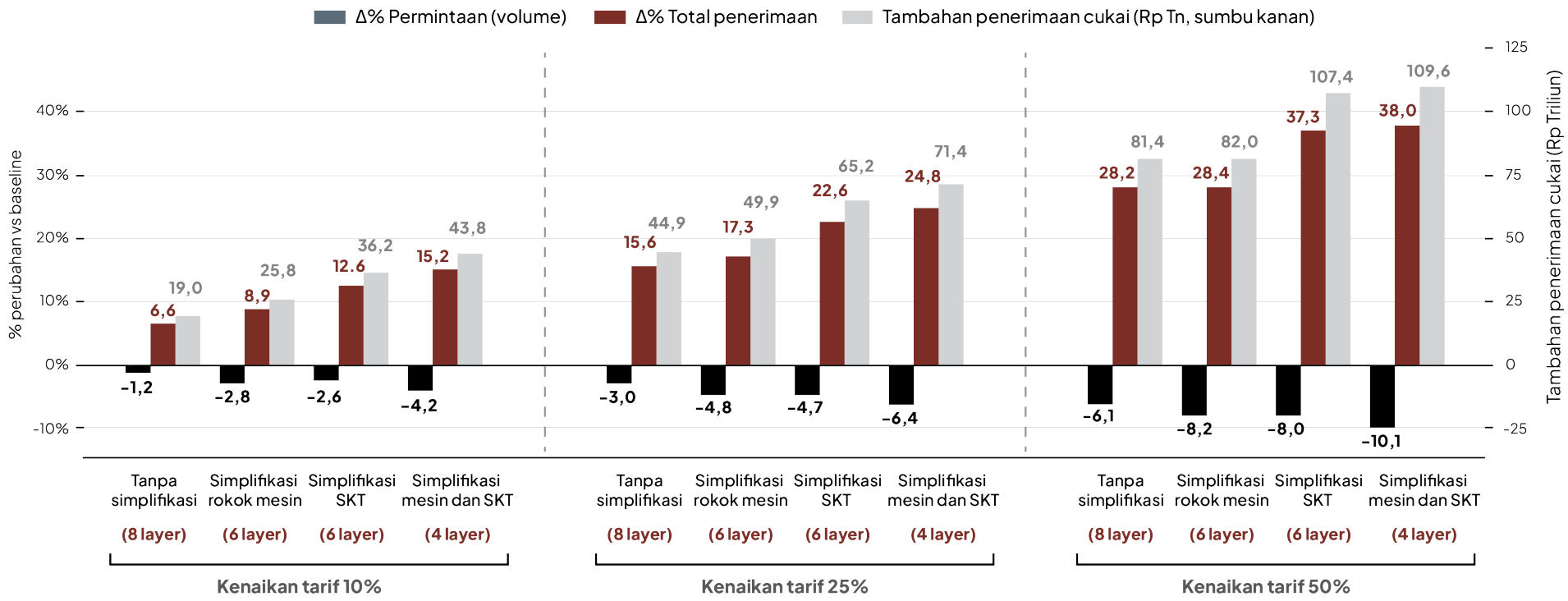
5.2.1 Dampak Terhadap Konsumsi dan Penerimaan Cukai dalam Berbagai Skenario

Gambar 5 menyajikan estimasi dampak reformasi cukai rokok pada dua belas skenario kebijakan. Peningkatan tarif cukai rokok mengurangi konsumsi rokok sekaligus menghasilkan tambahan penerimaan cukai bagi pemerintah. Dampaknya terlihat semakin besar seiring dengan kenaikan tarif cukai dan penyederhanaan lebih lanjut terhadap struktur *layer* cukai rokok.

Dalam seluruh skenario kenaikan cukai, penyederhanaan golongan yang lebih luas, khususnya pada Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun melalui penyederhanaan secara bersamaan pada golongan rokok linting tangan dan mesin, secara konsisten menghasilkan penurunan konsumsi rokok terbesar serta tambahan penerimaan cukai tertinggi. Dampak terbesar terlihat pada Skenario 3.4, yang menggabungkan kenaikan cukai sebesar 50% dengan penyederhanaan golongan rokok buatan tangan (SKT) dan rokok buatan mesin. Skenario ini menghasilkan penurunan konsumsi rokok sebesar 10,1% dan tambahan pendapatan cukai sebesar Rp109,6 triliun.

.

Gambar 5. Tambahan penerimaan pemerintah cukai dan perubahan permintaan rokok pada berbagai skenario



Simplifikasi layer merujuk pada penggabungan layer tarif untuk produk mesin (SKM/SPM) dan/atau (SKT); angka berwarna merah tua pada label sumbu X merujuk pada jumlah layer akhir setelah simplifikasi.

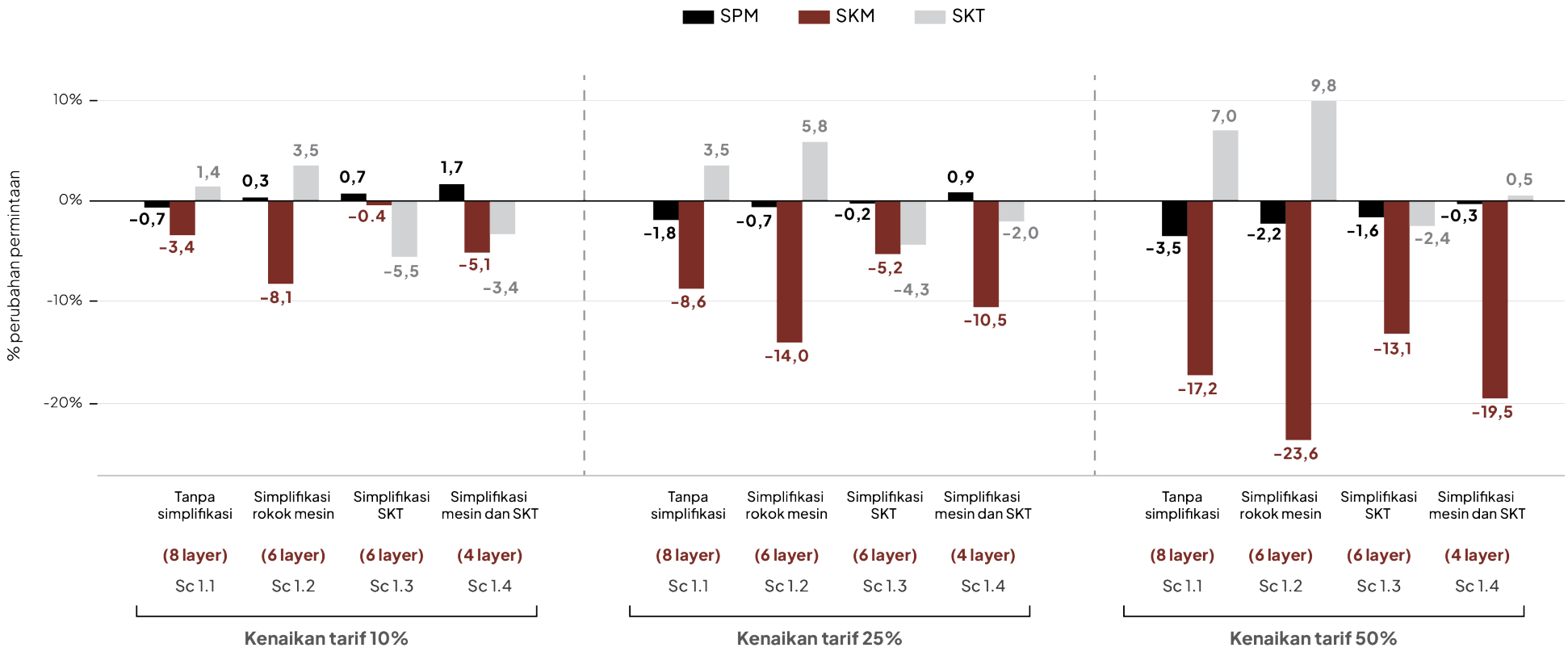
Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

Penguraian perubahan konsumsi rokok berdasarkan jenis produk menunjukkan bahwa SKM mengalami penurunan terbesar di semua skenario reformasi, mencapai sekitar 19,5 persen pada Skenario 3.4 (Gambar 6). Hal ini sebagian besar mencerminkan pangsa pasar SKM yang dominan dalam pasar rokok.

Meskipun total konsumsi rokok menurun di bawah semua skenario reformasi, distribusi penurunan tersebut bervariasi tergantung pada rancangan reformasi cukai. Ketika kenaikan cukai dipusatkan pada rokok buatan mesin–misalnya, dalam skenario penyederhanaan tingkat cukai rokok buatan mesin (Skenario 1.2, 2.2, dan 3.2)–sebagian konsumen beralih dari SKM ke produk kretek linting tangan (SKT) yang harganya relatif lebih murah. Namun, skenario yang simplifikasi layer cukai baik untuk rokok buatan mesin maupun lintingan tangan (Skenario 1.4, 2.4, dan 3.4)–yang juga menaikkan harga SKT secara signifikan–mengurangi perilaku peralihan tersebut dengan memperkecil selisih harga antarproduk rokok. Akibatnya, penyederhanaan tingkat cukai SKM/SPM dan SKT secara bersamaan menghasilkan penurunan total konsumsi rokok yang lebih besar dibandingkan reformasi yang hanya menyasar satu segmen pasar rokok.

.

Gambar 6. Perubahan permintaan berdasarkan jenis rokok di berbagai skenario



Simplifikasi layer merujuk pada penggabungan layer tarif untuk produk mesin (SKM/SPM) dan/atau (SKT); angka berwarna merah tua pada label sumbu X merujuk pada jumlah layer akhir setelah simplifikasi.

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan tabel IO.

5.2.2 Dampak Makroekonomi Lintas Skenario

Gambar 7 menyajikan estimasi dampak makroekonomi bersih dari dua belas skenario reformasi cukai rokok berdasarkan empat skema alternatif penggunaan pendapatan pemerintah. Pada semua skenario yang disimulasikan, reformasi cukai rokok menghasilkan dampak bersih positif terhadap output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Besaran dampak ini umumnya meningkat seiring dengan besarnya kenaikan cukai dan tingkat penyederhanaan struktur cukai. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi yang lebih komprehensif, yang memadukan kenaikan cukai yang lebih besar dengan penyederhanaan struktur cukai yang lebih luas (*layer* menjadi lebih sedikit), dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian secara keseluruhan.

Di antara berbagai skenario yang disimulasikan, reformasi paling komprehensif, yang menggabungkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen dengan penyederhanaan serentak pada golongan rokok kretek tangan (SKT) maupun rokok buatan mesin (SKM/SPM) dalam kerangka alokasi pendapatan pemerintah yang berlaku saat ini, menghasilkan keuntungan makroekonomi bersih terbesar. Melalui strategi reformasi ini, total output ekonomi diperkirakan meningkat sebesar Rp315,1 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp81,7 triliun, dan lapangan kerja bertambah sekitar 1,14 juta posisi secara bersih.

Gambar 7. Dampak reformasi cukai rokok: output, pendapatan, dan ketenagakerjaan

Desain Tarif	Skema Alokasi	Kenaikan Cukai 10%			Kenaikan Cukai 25%			Kenaikan Cukai 50%		
		Output Bersih (Rp Triliun)	Pendapatan Bersih (Rp Triliun)	Tenaga Kerja Bersih (ribu orang)	Output Bersih (Rp Triliun)	Pendapatan Bersih (Rp Triliun)	Tenaga Kerja Bersih (ribu orang)	Output Bersih (Rp Triliun)	Pendapatan Bersih (Rp Triliun)	Tenaga Kerja Bersih (ribu orang)
8 → 4 layer (penyederhanaan rokok tangan dan mesin)	C	126,59	32,84	446	206,41	53,26	731	315,09	81,68	1.145
	D.II	122,74	29,70	402	199,16	48,16	661	305,49	73,87	1.037
	3	116,75	26,87	459	189,44	43,58	752	290,59	66,83	1.117
	D.I	118,11	27,34	370	191,66	44,33	608	293,99	67,99	956
8 → 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)	C	104,36	27,07	360	187,46	4,59	655	308,15	79,85	1.095
	D.II	101,18	24,48	324	181,75	43,94	590	298,77	72,21	989
	E	96,24	22,15	371	172,88	39,75	674	284,19	65,33	1.126
	D.I	97,37	22,53	298	174,90	40,44	542	287,51	66,47	910
8 → 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)	C	73,91	19,15	267	142,95	37,03	522	234,92	60,86	880
	D.II	71,66	17,32	242	138,59	33,48	473	227,77	55,04	799
	E	68,6	15,67	275	131,83	30,29	536	216,65	49,79	904
	D.I	68,96	15,94	223	133,37	30,82	436	219,19	50,66	739
Tanpa penyederhanaan	C	54,09	14,00	190	128,10	33,16	456	232,46	60,19	845
	D.II	52,44	12,66	172	124,19	29,99	412	225,38	54,43	765
	E	59,88	11,45	196	118,13	27,12	469	214,38	49,23	869
	D.I	50,46	11,65	158	119,52	27,60	379	216,89	50,09	706

Keuntungan makroekonomi bersih: Rendah — Tinggi

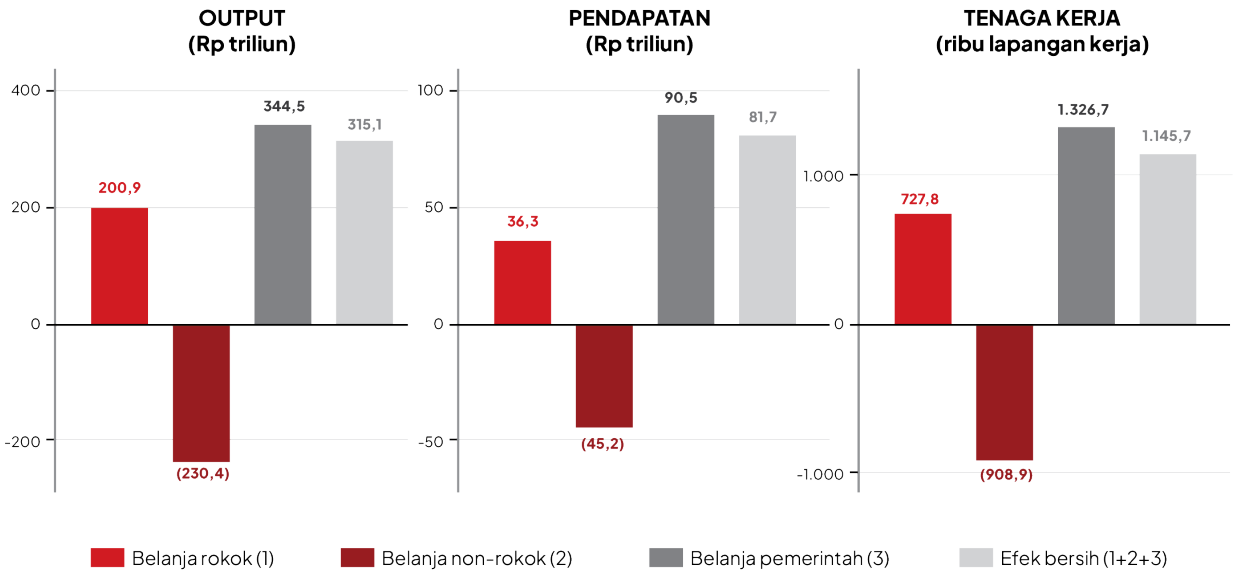
Skenario dengan dampak makroekonomi tertinggi: 8 → 4 layer–C: +50% cukai, penyederhanaan, alokasi *business as usual*

5.2.3 Dekomposisi Dampak Ekonomi pada Skenario dengan Keuntungan Ekonomi Tertinggi

Dalam skenario reformasi yang paling komprehensif, dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan disalurkan melalui tiga saluran. Pertama, harga rokok yang lebih tinggi meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok, meskipun volume konsumsinya menurun, mengingat orang yang tetap merokok perlu membayar lebih mahal untuk rokok. Kedua, rumah tangga mengalihkan pengeluaran dari barang dan jasa non-rokok untuk menutupi peningkatan belanja rokok tersebut, sehingga sebagian mengimbangi ekspansi ekonomi yang dihasilkan. Ketiga, tambahan pendapatan pemerintah dari reformasi disalurkan kembali melalui belanja publik dengan skema alokasi konvensional (*business-as-usual*, BAU), yang memicu aktivitas ekonomi lebih lanjut. Secara keseluruhan, dampak makroekonomi yang positif terutama didorong oleh efek ekspansif dari belanja pemerintah yang dibiayai oleh tambahan penerimaan pemerintah dari cukai rokok, yang dampaknya lebih besar daripada kontraksi pada pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa non-rokok.

Penguraian hasil simulasi menunjukkan kontribusi dari setiap saluran (Gambar 8). Peningkatan belanja rokok (Simulasi A) menaikkan output ekonomi sebesar Rp200,9 triliun, sementara realokasi dari belanja non-rokok (Simulasi B) menurunkan output sebesar Rp230,4 triliun. Belanja pemerintah yang didanai oleh tambahan penerimaan dari cukai rokok (Simulasi C) memberikan kontribusi tambahan sebesar Rp344,5 triliun. Secara keseluruhan, dampak-dampak ini menghasilkan peningkatan bersih output ekonomi sebesar Rp315,1 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp81,7 triliun, serta penciptaan sekitar 1,14 juta lapangan kerja.

Gambar 8. Dekomposisi dampak



Sumber: Perhitungan penulis

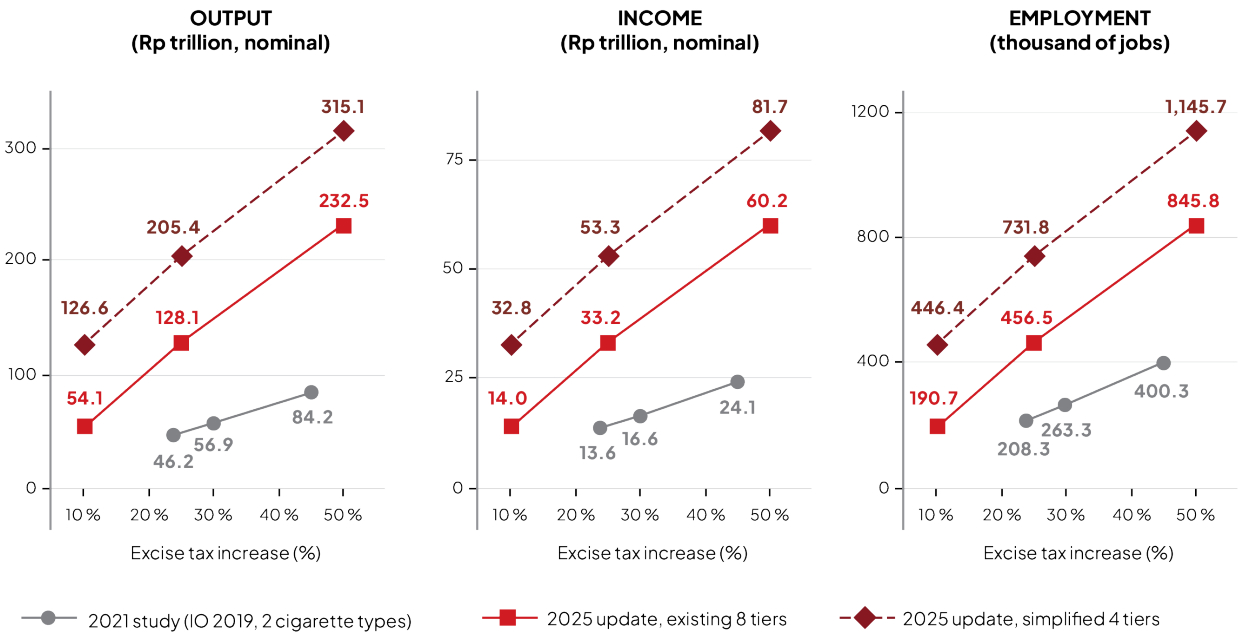
5.2.4 Perbandingan dengan studi CISDI tahun 2021

Gambar 9 membandingkan dampak makroekonomi bersih yang diestimasi dalam studi ini dengan studi input-output 2021 kami [7]. Kedua studi melaporkan dampak bersih pada alokasi *business-as-usual* atas penerimaan tambahan, dalam nilai nominal. Namun, skenario reformasinya berbeda. Studi 2021 mensimulasikan kenaikan tarif cukai 2020 (23,8 persen untuk kretek dan 27,2 persen untuk rokok putih) serta kenaikan 30 dan 45 persen, tanpa mengubah struktur layer cukai. Studi ini mensimulasikan kenaikan 10, 25, dan 50 persen, membedakan tiga jenis rokok (SKM, SKT, dan SPM), serta mengevaluasi penyederhanaan layer cukai. Gambar 9 menampilkan struktur delapan layer yang ada saat ini dan struktur yang disederhanakan menjadi empat *layer*.

Karena besaran kenaikan cukainya tidak sama, perbandingan difokuskan pada level yang paling mendekati. Pada struktur delapan layer yang ada, kenaikan cukai 25 persen akan meningkatkan output sebesar Rp128,1 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp33,2 triliun, dan lapangan kerja sebanyak 456,5 ribu. Sebagai pembanding, kenaikan 30 persen dalam studi 2021 menghasilkan Rp56,9 triliun, Rp16,6 triliun, dan 263,3 ribu lapangan kerja. Kenaikan 50 persen akan meningkatkan output sebesar Rp232,5 triliun, pendapatan agregat sebesar Rp60,2 triliun, dan lapangan kerja sebanyak 845,8 ribu. Pembandingnya, kenaikan 45 persen dalam studi 2021 menghasilkan Rp84,2 triliun, Rp24,1 triliun, dan 400,3 ribu lapangan kerja. Jika kenaikan 50 persen dikombinasikan dengan penyederhanaan layer, manfaatnya meningkat lebih jauh menjadi Rp315,1 triliun, Rp81,7 triliun, dan 1,14 juta lapangan kerja.

Besaran ini perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Studi 2021 menggunakan Tabel IO 2010 yang diperbarui ke tahun 2019 dan elastisitas permintaan untuk hanya dua jenis rokok. Sebaliknya, studi ini menggunakan Tabel IO 2020 yang diperbarui ke tahun 2025. Nilai nominalnya sebagian mencerminkan perubahan harga dan pertumbuhan ekonomi antara 2019 dan 2025. Meskipun berbeda, kedua studi sampai pada kesimpulan yang sama. Pada keduanya, kenaikan cukai rokok menghasilkan dampak makroekonomi bersih yang positif dan makin besar seiring besarnya kenaikan cukai, terutama didorong oleh belanja pemerintah atas penerimaan tambahan. Sebaliknya, dampak penurunan konsumsi rokok dan realokasi belanja rumah tangga sebagian besar saling menghapus (Gambar 8). Pembaruan ini juga menunjukkan bahwa penyederhanaan struktur layer meningkatkan manfaat tersebut.

Gambar 9. Dampak makroekonomi bersih pada studi 2021 dan situasi 2025 (nilai nominal)



Catatan: Estimasi studi 2021 pada titik 23,8% sesuai dengan skenario kenaikan cukai setara tarif 2020 (23,8% untuk kretek dan 27,2% untuk rokok putih). Seri 2025 sesuai dengan Skenario 1.1, 2.1, dan 3.1 (delapan layer yang ada) serta Skenario 1.4, 2.4, dan 3.4 (empat layer) pada Simulasi C.

5.2.5 Potensi Transisi Tenaga Kerja dari Sektor Tembakau

Dalam skenario dengan keuntungan ekonomi tertinggi, tidak ada satu pun sektor yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam jumlah lapangan kerja. Hal ini mencerminkan struktur jangka pendek dari model tersebut: karena permintaan rokok bersifat relatif inelastis, kenaikan harga lebih dari sekadar mengimbangi penurunan volume konsumsi, sehingga mempertahankan pengeluaran nominal untuk rokok serta permintaan tenaga kerja di sektor-sektor terkait tembakau tepat setelah reformasi dilakukan. Dengan demikian, penambahan lapangan kerja tersebut mencerminkan ekspansi ekonomi yang menyeluruh, bukan sekadar realokasi pekerja dari sektor tembakau ke sektor lain.

Hasil ini tidak menyiratkan bahwa lapangan kerja di sektor tembakau akan tetap aman dalam jangka panjang. Kenaikan cukai yang berkelanjutan dan penurunan prevalensi merokok kemungkinan akan mengurangi output serta lapangan kerja di sektor tembakau seiring berjalannya waktu, sementara kerangka kerja Input-Output yang bersifat statis tidak dapat menangkap dampak-dampak dinamis tersebut. Oleh karena itu, transisi bertahap para pekerja ke sektor-sektor yang sedang berkembang (yaitu industri non-tembakau) merupakan prospek jangka panjang yang realistis. Persiapan menghadapi transisi ini selagi lapangan kerja secara agregat masih terus bertambah akan memungkinkan para pekerja untuk beralih secara bertahap ke peluang-peluang baru, alih-alih menghadapi risiko kehilangan pekerjaan akibat kontraksi sektor yang terjadi secara mendadak.

Sektor-sektor dengan peningkatan lapangan kerja terbesar memberikan indikasi mengenai di mana transisi ini dapat terjadi. Sektor-sektor tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam pertanian dan sektor primer, industri dan utilitas, serta jasa dan perdagangan (Tabel 14).

Tabel 14. Sektor tujuan potensial untuk transisi tenaga kerja dari sektor tembakau

Sektor sasaran	Lowongan kerja bersih (orang)	Peningkatan dari nilai dasar (%)
Pertanian dan kegiatan primer		
Pertanian tanaman pangan	39.770	0,20
Peternakan	4.824	0,10
Jasa pertanian dan perburuan	2.614	0,91
Tanaman hortikultura musiman dan tahunan	675	0,03
Perikanan	591	0,04
Industri dan utilitas		
Konstruksi	9.746	0,10
Industri makanan dan minuman	9.038	0,15
Industri kertas dan produk kertas	8.059	1,03
Penyediaan air, pengelolaan limbah, serta penanganan sampah dan daur ulang	5.332	0,89
Industri kimia, farmasi, dan obat-obatan tradisional	3.225	0,46
Jasa dan perdagangan		
Perdagangan grosir dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor	45,087	0.19
Penyediaan akomodasi	20,462	1.08
Jasa perusahaan	18,508	0.72
Penyediaan makanan dan minuman	14,889	0.15
Angkutan darat	9,838	0.37

Sumber: Perhitungan penulis.

Dalam sektor pertanian dan kegiatan primer, sebagian besar penyerapan tenaga kerja terkonsentrasi pada tanaman pangan, peternakan, tanaman musiman dan hortikultura, perikanan, serta jasa pertanian; sektor-sektor ini menawarkan kesesuaian keterampilan yang paling tepat bagi pekerja perkebunan yang beralih profesi, karena kompetensi mereka dalam pengelolaan tanah, perawatan tanaman, penanganan panen, dan rantai pasok pedesaan dapat langsung diterapkan. Bukti dari Survei Petani Tembakau (*Tobacco Farmers Survey*, TFS) longitudinal di Indonesia memperkuat gambaran ini: mantan petani tembakau yang sepenuhnya berhenti menanam tembakau memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan mereka yang tetap bertahan, dengan pendapatan lebih tinggi serta mata pencaharian yang lebih beragam, yang mencakup usaha mandiri, pekerjaan

dengan upah, dan kegiatan lainnya. Yang terpenting, transisi ini tidak mengharuskan perubahan total identitas sebagai petani; hampir seluruh mantan petani tembakau (98,85 persen) telah terlibat dalam kegiatan pertanian non-tembakau dalam dua belas bulan sebelum survei dilakukan, dan proporsi lahan yang lebih besar untuk tanaman tembakau justru berkorelasi dengan pendapatan rumah tangga yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa peralihan dari budidaya tembakau tidak hanya dapat dikelola secara ekonomi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani yang terdampak [27].

Di sektor industri dan manufaktur, lowongan kerja terutama berasal dari industri konstruksi, makanan dan minuman, serta kertas, disusul oleh sektor pengelolaan air dan limbah serta industri kimia. Sektor-sektor ini sangat cocok bagi pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan mereka, karena keterampilan mereka dalam pengoperasian mesin, pengendalian mutu, pengemasan, dan manajemen lini produksi dapat diterapkan secara langsung di bidang-bidang tersebut. Data survei mendukung kesesuaian ini: sekitar 40 persen pekerja pabrik rokok kretek sebelumnya pernah bekerja di sektor-sektor serupa—yakni produksi makanan, pertanian, ritel, dan jasa sebelum terjun ke industri tembakau [28].

6
PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi cukai rokok di Indonesia dapat secara bersamaan mengurangi konsumsi rokok, memperkuat kapasitas fiskal, dan menghasilkan dampak makroekonomi bersih yang positif. Dalam semua skenario reformasi yang disimulasikan, kenaikan cukai rokok secara konsisten menurunkan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan pemerintah dari cukai serta menghasilkan keuntungan bersih pada output ekonomi, pendapatan agregat, dan lapangan kerja. Temuan ini mengisyaratkan bahwa dampak ekonomi dari reformasi cukai rokok tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penurunan permintaan rokok dalam jangka pendek serta potensi implikasinya terhadap output dan lapangan kerja di sektor tembakau. Sebaliknya, diperlukan perspektif ekonomi yang menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian untuk menangkap penyesuaian yang lebih luas yang terjadi pasca-reformasi.

Lebih lanjut, analisis kami menunjukkan bahwa penyederhanaan *layer* cukai rokok secara signifikan meningkatkan efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau. Untuk setiap kenaikan tarif cukai tertentu, skenario yang menerapkan penyederhanaan *layer* secara lebih luas secara konsisten menghasilkan penurunan konsumsi rokok yang lebih besar, penerimaan pemerintah yang lebih tinggi, serta manfaat makroekonomi yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan struktur sistem cukai rokok berlapis di Indonesia, di mana perbedaan tarif yang besar menciptakan insentif bagi produsen dan konsumen untuk beralih ke kategori rokok dengan tarif lebih rendah, baik di dalam maupun antar-kategori produk SKM, SKT, dan SPM. Dengan memperkecil perbedaan harga tersebut, penyederhanaan *layer* memungkinkan kenaikan tarif cukai untuk diteruskan secara lebih efektif menjadi harga eceran yang lebih tinggi, penurunan konsumsi rokok yang lebih besar, serta penerimaan pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, temuan ini dapat menjadi rasionalisasi tambahan untuk melanjutkan kembali agenda penyederhanaan *layer* cukai rokok di Indonesia seiring dengan kenaikan tarif cukai di masa mendatang.

Dampak makroekonomi positif yang diamati dalam penelitian ini terutama didorong oleh realokasi pendapatan pemerintah tambahan yang diperoleh dari kenaikan cukai rokok. Pendapatan tambahan tersebut disalurkan kembali ke dalam perekonomian melalui belanja publik, sehingga memicu aktivitas ekonomi di sektor-sektor non-rokok dan mengimbangi dampak kontraksioner akibat penurunan konsumsi rokok serta perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Hal ini memberikan dampak bersih yang positif terhadap output ekonomi, pendapatan agregat rumah tangga, dan lapangan kerja di seluruh skenario reformasi yang disimulasikan. Temuan ini menyoroti pentingnya memperhitungkan penggunaan pendapatan pemerintah tambahan saat mengevaluasi dampak cukai tembakau terhadap perekonomian secara keseluruhan, alih-alih hanya berfokus kekhawatiran akan dampaknya terhadap permintaan rokok dan lapangan kerja di industri tembakau.

Simulasi kami juga menunjukkan bahwa dampak makroekonomi dari reformasi cukai rokok sebagian bergantung pada bagaimana tambahan penerimaan dari cukai rokok dialokasikan. Berdasarkan kerangka Input-Output, alokasi tambahan pendapatan tersebut sesuai dengan struktur belanja pemerintah yang ada saat ini menghasilkan peningkatan terbesar dalam output ekonomi, pendapatan

agregat, dan lapangan kerja, karena porsi belanja yang lebih besar mengalir ke sektor-sektor dengan pengganda ekonomi yang relatif tinggi. Temuan ini sejalan dengan penelitian input-output kami tahun 2021, yang juga menemukan bahwa mempertahankan struktur belanja pemerintah yang ada dapat menghasilkan dampak makroekonomi jangka pendek yang relatif kuat [7]. Sebaliknya, alokasi proporsi penerimaan yang lebih besar untuk layanan kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghasilkan peningkatan makroekonomi jangka pendek yang sedikit lebih rendah. Namun, hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai indikasi bahwa pola alokasi konvensional (*business-as-usual,* BAU) merupakan pilihan kebijakan yang paling tepat, mengingat belanja kesehatan juga menghasilkan manfaat kesehatan dan sosial yang penting di luar aspek-aspek yang tercakup dalam analisis ini. Oleh karena itu, keputusan mengenai alokasi tambahan penerimaan dari cukai rokok harus mempertimbangkan baik dampak makroekonomi jangka pendek maupun tujuan kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Kerangka kerja Input-Output yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model statis yang menangkap penyesuaian sisi permintaan dalam jangka pendek, namun tidak memperhitungkan perubahan struktural jangka panjang, kemajuan teknologi, respons perusahaan, ataupun penyesuaian dinamis pasar tenaga kerja. Dalam jangka pendek, karena permintaan rokok bersifat relatif inelastis, persentase penurunan konsumsi rokok mungkin lebih kecil dibandingkan persentase kenaikan harga rokok, yang mengakibatkan peningkatan total pengeluaran untuk rokok dan penjualan sektor tembakau meskipun konsumsi rokok menurun. Untuk alasan yang sama, penerimaan cukai diperkirakan akan terus meningkat meskipun konsumsi rokok menurun, sehingga menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi program kesehatan dan sosial. Potensi peningkatan penerimaan ini dapat bertahan dalam jangka panjang, bergantung pada respons permintaan rokok terhadap kenaikan cukai yang berkelanjutan, serta memberikan tambahan ruang fiskal untuk mendukung program kesehatan dan sosial. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kenaikan cukai yang berkelanjutan dan penurunan prevalensi merokok dapat mengurangi produksi serta penyerapan tenaga kerja di sektor tembakau, sementara rumah tangga mungkin mengalihkan pengeluaran ke barang dan jasa lain, dan pekerja yang terdampak dapat beralih ke sektor-sektor lain [6,29]. Hasil analisis ketenagakerjaan dalam penelitian ini memberikan indikasi mengenai potensi transisi tersebut, mengingat beberapa sektor non-tembakau mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dalam skenario reformasi dan berpotensi menyediakan peluang kerja alternatif seiring menurunnya aktivitas sektor tembakau. Namun, penelitian ini tidak mengkaji apakah transisi semacam itu akan benar-benar terjadi dalam praktiknya atau apakah pekerja sektor tembakau dapat berhasil beralih ke sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu mengkaji realokasi tenaga kerja yang dinamis dan transisi pekerja guna memahami secara lebih baik dampak jangka panjang reformasi cukai rokok terhadap ketenagakerjaan.

Kedua, karena tabel Input-Output spesifik subsektor yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mencakup data sub-sektor per jenis rokok, analisis ini tidak dapat membedakan struktur input antara bagi SKM, SKT, dan SPM secara detail. Akibatnya, ketiga subsektor rokok tersebut diasumsikan memiliki struktur input/produksi yang sama, di mana heterogenitas hanya tercermin melalui pangsa produksi dan intensitas tenaga kerja yang teramati. Seiring dengan tersedianya statistik Input-Output yang lebih rinci, penelitian di masa mendatang sebaiknya memasukkan struktur produksi spesifik subsektor guna meningkatkan ketepatan estimasi dampak sektoral.

Terakhir, keterbatasan data juga membatasi estimasi parameter perilaku utama, khususnya elastisitas permintaan rokok. Sebagaimana dibahas pada Bagian 4.2, ketersediaan data survei rumah tangga (Susenas) membatasi estimasi respons perilaku konsumen secara spesifik untuk setiap jenis rokok, yaitu SKM, SKT, dan SPM. Data survei rumah tangga yang tersedia (Susenas) tidak menyajikan informasi yang cukup rinci mengenai pengeluaran dan harga rokok berdasarkan jenisnya, sehingga membatasi estimasi respons perilaku spesifik produk untuk kategori SKM, SKT, dan SPM. Penelitian di masa mendatang juga dapat mengkaji penggunaan rokok elektrik serta potensi substitusi antara rokok konvensional dan rokok elektrik, yang memerlukan data lebih rinci mengenai konsumsi, harga, dan perilaku konsumen terkait rokok elektrik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan memperoleh manfaat dari data survei yang lebih terperinci, yang membedakan pengeluaran rokok dan harga eceran berdasarkan kategori produk serta karakteristik konsumen. Peningkatan semacam ini akan memungkinkan estimasi responsivitas harga yang lebih akurat dan kokoh, sekaligus memperkuat evaluasi ekonomi di masa depan terhadap reformasi cukai rokok.

7
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa cukai rokok tidak hanya merupakan kebijakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dan ekonomi yang penting. Berdasarkan seluruh skenario yang dikaji, reformasi cukai rokok diproyeksikan dapat menurunkan konsumsi rokok sekaligus memberikan dampak bersih yang positif terhadap output ekonomi, pendapatan rumah tangga agregat, dan lapangan kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai tembakau yang lebih ketat tidak menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara keseluruhan apabila dampaknya ditinjau secara luas dari perspektif makroekonomi, di bawah asumsi yang dipakai dalam studi ini. Selain itu, penelitian ini menyajikan penilaian awal mengenai potensi realokasi tenaga kerja dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang sedang berkembang yang dapat menyediakan peluang kerja alternatif.

Temuan-temuan ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan tarif cukai rokok yang signifikan dan berkelanjutan, disertai dengan penyederhanaan struktur tingkat cukai, guna memperkuat efektivitas kebijakan cukai tembakau. Untuk memastikan bahwa kenaikan tarif cukai diikuti oleh kenaikan harga yang dibayarkan konsumen dan meningkatkan efektivitas kebijakan cukai hasil tembakau, pemerintah juga perlu menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) minimum secara proporsional. Langkah ini dapat membatasi peralihan produsen dan konsumen ke produk rokok dengan harga yang lebih murah (downtrading) sebagai respons terhadap kenaikan cukai.

Di antara berbagai skenario yang dikaji dalam penelitian ini, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen yang dipadukan dengan penyederhanaan struktur cukai dari delapan tingkat menjadi empat tingkat menghasilkan estimasi keuntungan makroekonomi bersih terbesar, sekaligus menurunkan konsumsi rokok secara signifikan dan meningkatkan penerimaan pemerintah. Kedua, mengingat sifat industri tembakau yang tidak berkelanjutan pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah transisi tenaga kerja yang terarah, seperti program pelatihan ulang keterampilan, bantuan transisi pekerjaan, dan strategi diversifikasi ekonomi lokal bagi masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau untuk mempertahankan manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang ditunjukkan dalam penelitian ini. Skenario ini menjadi acuan penting bagi reformasi kebijakan cukai rokok di Indonesia di masa mendatang.

Daftar Pustaka

1. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
2. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. Satu Dekade Beban Ekonomi Merokok di Indonesia, 2019–2029: Estimasi dan Proyeksi Cost-of-Illness pada Perokok Aktif, Perokok Pasif, dan Mantan Perokok. Jakarta; 2026.
3. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. Cigarette Affordability in Indonesia: Recent Trends and Elasticity. Jakarta: CISDI; 2026.
4. Bella A, Swarnata A, Vulovic V, Nugroho D, Meilissa Y, Usman U, et al. Macroeconomic impact of tobacco taxation in Indonesia. Tob Control. 2023 Feb 1;tc-2022–057735. doi:10.1136/tc-2022–057735
5. World Health Organization. WHO technical manual on tobacco tax policy and administration [Internet]. 2021. Available from: https://www.who.int/publications/b/56603
6. Sahadewo GA, Iglesias RM, Araujo EC, Nargis N, Harimurti P, Drope J, et al. The economics of tobacco taxation and employment in Indonesia : health population and nutrition global practice (English) [Internet]. WBG Global Tobacco Control Program Washington, D.C. : World Bank Group; 2017. Available from: http://documents.worldbank.org/curated/en/919961507699751298/health-population-and-nutrition-global-practice
7. Bella A, Swarnata A, Vulovic V, Nugroho D, Meilissa Y, Usman U, et al. Macroeconomic impact of tobacco taxation in Indonesia. Tob Control. 2024;33(Suppl 2):s108–14. doi:10.1136/tc-2022–057735
8. Zheng R. Cigarette Affordability in Indonesia : 2002 - 2017. World Bank Organization. 2018 May. doi:http://hdl.handle.net/10986/30027
9. Sarjana SP, Adrison V, University of Indonesia, Depok, Indonesia. The Impact of Multi-Tiered Specific Excise Tax Systems on the Creation of New Tobacco Brands in Indonesia: Public Health Implications. JTR. 2024;10(2):397–416. doi:10.15826/jtr.2024.10.2.175
10. Adrison V, Dauchy E. The impact of tax and price reforms on companies' prices in a complex cigarette tax system. Applied Economics. 2023 Dec 14;1–20. doi:10.1080/00036846.2023.2289905
11. Prasetyo BW, Adrison V. Cigarette prices in a complex cigarette tax system: empirical evidence from Indonesia. Tob Control. 2019 Jun 28;tobaccocontrol-2018–054872. doi:10.1136/tobaccocontrol-2018–054872
12. World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2025: warning about the dangers of tobacco. Geneva; 2025.
13. Chaloupka FJ, Straif K, Leon ME. Effectiveness of tax and price policies in tobacco control. Tob Control. 2011 May;20(3):235–8. doi:10.1136/tc.2010.039982
14. Chaloupka FJ, Yurekli A, Fong GT. Tobacco taxes as a tobacco control strategy. Tob Control. 2012 Mar;21(2):172–80. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011–050417
15. Barber S et. al, Adioetomo SM, Ahsan A, Setyonaluri D. Tobacco Economics in Indonesia [Internet]. Paris: InterNational Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2008. 94 p. (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease). Available from: http://www.worldlungfoundation.org/ht/a/GetDocumentAction/i/6567

16. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. Impact of Cigarette Prices and Social Factors on Youth Smoking Initiation in Indonesia [Internet]. Jakarta; 2025. Available from: https://cisdi.org/en/research-and-publication/publication/impact-of-cigarette-prices-and-social-factors-on-youth-smoking-initiation-in-indonesia

17. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. The impacts of cigarette prices on adult smoking cessation in Indonesia. Jakarta: CISDI; 2024.

18. Goodchild M, Perucic AM, Nargis N. Modelling the impact of raising tobacco taxes on public health and finance. Bull World Health Organ. 2016 Apr 1;94(4):250–7. doi:10.2471/BLT.15.164707 PubMed PMID: 27034518; PubMed Central PMCID: PMC4794304.

19. World Health Organization. The economic and health benefits of tobacco taxation [Internet]. 2015. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-15.6

20. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. Raising and Simplifying the Cigarette Excise Tax in Indonesia: Simulated Revenue Gains and Public Health Benefits. Jakarta; 2026.

21. Bella A, Swarnata A, Nugroho D, Usman, Meilissa Y, Dartanto T. The Macroeconomic Impacts of Tobacco Taxation.

22. Ahsan A, Wiyono N. An Analysis of The Impact of Higher Cigarette Prices on Employment in Indonesia. Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA); 2007.

23. Deaton A. The analysis of household surveys: A microeconometric approach to development policy [Internet]. The World Bank; 1997 [cited 2022 Oct 27]. Available from: http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/0-8018-5254-4 doi:10.1596/0-8018-5254-4

24. John RM, Vulovic V, Chelwa G, Chaloupka FJ. Updated Toolkit on Using Household Expenditure Surveys for Research in the Economics of Tobacco Control. A Tobacconomics Toolkit. [Internet]. Chicago, IL: Tobacconomics, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois Chicago; 2023. Available from: www.tobacconomics.org

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau [Internet]. Jakarta; 2024. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Details/306305/pmk-no-72-tahun-2024

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok [Internet]. 2023. Available from: https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/c92ad6a3-2a53-4283-ad44-23ce0f4f0c8c/2023pmkeuangan143.pdf

27. Sahadewo GA, Drope J, Firman Witoelar, Li Q, Lencucha R. The Economics of Tobacco Farming in Indonesia: 4th Wave Tobacco Farmers Survey [Internet]. Economics for Health; 2026. Available from: http://economicsforhealth.org/files/research/1106/indonesia-tobacco-farming-study-wave4-report-final-.pdf

28. Nargis N, Sahadewo G, Araujo EC, Harimurti P, Drope J, Durazo J, et al. The economics of Kretek rolling in Indonesia [Internet]. World Bank; 2017. Available from: http://documents.worldbank.org/curated/en/644791507704057981

29. Cicowiez M, Cruces G, Falcone G, Puig J. On the impacts of higher tobacco taxes in Argentina: a compuTabel general equilibrium approach. Tob Control. 2024 Jun 4;33(Suppl 2):s115–21. doi:10.1136/tc-2022-057725 PubMed PMID: 37041076; PubMed Central PMCID: PMC11187390.

Lampiran 1. Ringkasan tabel IO (55 Sektor)

Tabel A1. Ringkasan tabel IO

Kode	Sektor	Pengganda Tipe-II			Porsi Output	Porsi Pendapatan	Porsi Ketenaga-kerjaan	Porsi Konsumsi Rumah Tangga	Porsi Konsumsi Pemerintah
		Output	Pendapatan	Ketenaga-kerjaan					
1	Pertanian tanaman pangan	2,21	0,57	0,036	1,50%	2,46%	13,26%	0,58%	0,00%
2	Tanaman hortikultura musiman, tanaman hortikultura tahunan, dan pertanian lainnya	2,05	0,46	0,009	0,92%	1,18%	1,54%	2,36%	0,00%
3	Tanaman perkebunan musiman dan tahunan	2,15	0,51	0,014	3,11%	4,32%	8,41%	0,15%	0,00%
4	Peternakan	2,57	0,60	0,015	1,33%	1,99%	3,40%	1,14%	0,00%
5	Jasa pertanian dan perburuan	2,09	0,45	0,009	0,14%	0,17%	0,20%	0,00%	0,00%
6	Kehutanan dan penebangan kayu	2,16	0,56	0,006	0,35%	0,57%	0,21%	0,01%	0,00%
7	Perikanan	2,09	0,51	0,007	1,64%	2,47%	1,14%	3,72%	0,00%
8	Pertambangan minyak, gas, dan panas bumi	1,99	0,31	0,003	1,76%	1,13%	0,12%	0,00%	0,00%
9	Pertambangan batu bara dan lignit	2,15	0,32	0,004	3,21%	1,72%	0,25%	0,00%	0,00%
10	Pertambangan bijih logam	1,96	0,33	0,004	1,33%	0,96%	0,40%	0,00%	0,00%
11	Pertambangan dan penggalian lainnya	2,26	0,46	0,005	1,21%	1,28%	0,41%	0,00%	0,00%
12	Industri batu bara serta pengilangan minyak dan gas	2,00	0,22	0,002	2,00%	0,58%	0,20%	1,82%	0,00%
13	Industri makanan dan minuman	2,58	0,42	0,012	10,84%	4,16%	4,00%	18,39%	0,34%
1411	Industri rokok putih mesin (SPM)	2,20	0,40	0,008	0,02%	0,01%	0,01%	0,06%	0,00%
1412	Industri rokok kretek mesin (SKM)	2,20	0,40	0,006	0,33%	0,25%	0,02%	1,13%	0,00%
1413	Industri rokok kretek linting tangan (SKT)	2,20	0,40	0,010	0,27%	0,21%	0,32%	0,95%	0,00%
142	Industri pengolahan tembakau	2,34	0,39	0,021	0,04%	0,02%	0,17%	0,00%	0,00%
15	Industri tekstil dan pakaian jadi	2,73	0,43	0,013	1,65%	1,04%	2,89%	1,70%	0,00%
16	Industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	2,77	0,62	0,014	0,27%	0,37%	0,53%	0,22%	0,00%
17	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus, serta anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	2,63	0,49	0,012	0,48%	0,36%	0,95%	0,03%	0,00%
18	Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman	2,64	0,44	0,007	1,07%	0,73%	0,54%	0,13%	0,00%
19	Industri kimia, farmasi, dan obat-obatan tradisional	237	0,35	0,005	2,53%	1,31%	0,47%	1,82%	0,00%
20	Industri karet, barang dari karet, dan plastik	2,54	0,41	0,008	0,62%	0,32%	0,33%	0,23%	0,00%

Kode	Sektor	Pengganda Tipe-II			Porsi Output	Porsi Pendapatan	Porsi Ketenaga-kerjaan	Porsi Konsumsi Rumah Tangga	Porsi Konsumsi Pemerintah
		Output	Pendapatan	Ketenaga-kerjaan					
21	Industri penggalian non-logam	2,68	0,51	0,010	0,58%	0,60%	0,91%	0,04%	0,00%
22	Industri logam dasar	2,31	0,31	0,004	1,70%	0,75%	0,26%	0,00%	0,00%
23	Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik	2,31	0,42	0,006	2,19%	1,90%	1,02%	0,94%	0,00%
24	Mesin industri dan perlengkapan (yang tidak diklasifikasikan di tempat lain)	2,31	0,39	0,005	0,45%	0,30%	0,09%	0,03%	0,00%
25	Industri peralatan transportasi	2,61	0,55	0,006	1,53%	1,70%	0,35%	1,57%	0,00%
26	Industri furnitur	2,52	0,49	0,016	0,21%	0,20%	0,63%	0,23%	0,00%
27	Industri pengolahan lainnya, jasa perbaikan dan pemasangan mesin serta peralatan	2,38	0,39	0,007	0,19%	0,14%	0,15%	0,20%	0,00%
28	Kelistrikan	3,15	0,32	0,004	2,55%	0,54%	0,20%	2,47%	0,00%
29	Pengadaan gas dan produksi es	1,94	0,24	0,004	0,11%	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%
30	Pengadaan air, pengelolaan limbah, serta daur ulang	2,13	0,34	0,029	0,05%	0,04%	0,41%	0,14%	0,04%
31	Konstruksi	2,68	0,52	0,007	13,67%	12,61%	6,51%	0,38%	0,00%
32	Perdagangan dan perbaikan mobil serta sepeda motor	2,45	0,61	0,011	1,53%	2,53%	2,63%	2,45%	0,00%
33	Perdagangan grosir dan eceran (selain mobil dan sepeda motor)	2,40	0,57	0,011	8,62%	12,88%	16,11%	12,24%	0,04%
34	Angkutan kereta api	3,17	0,81	0,014	0,11%	0,21%	0,24%	0,15%	0,00%
35	Angkutan darat	2,46	0,44	0,007	3,22%	2,64%	1,81%	4,42%	0,00%
36	Angkutan laut	2,64	0,41	0,006	0,53%	0,29%	0,15%	0,56%	0,00%
37	Angkutan penyeberangan danau dan sungai	2,76	0,52	0,006	0,22%	0,21%	0,03%	0,34%	0,00%
38	Angkutan udara	2,65	0,45	0,006	1,85%	1,36%	0,22%	4,18%	0,00%
39	Jasa pergudangan dan penunjang angkutan, pos dan kurir	2,55	0,49	0,010	1,28%	1,32%	1,84%	1,06%	0,00%
40	Penyediaan akomodasi	2,43	0,50	0,015	0,48%	0,58%	1,29%	0,68%	0,00%
41	Penyediaan makanan dan minuman	2,88	0,57	0,017	2,77%	2,96%	6,69%	9,12%	0,00%
42	Jasa informasi dan komunikasi	2,33	0,43	0,005	3,84%	3,39%	0,73%	5,71%	0,27%
43	Jasa perantara keuangan selain bank sentral	2,23	0,54	0,006	1,89%	2,67%	0,88%	1,66%	0,89%
44	Asuransi dan dana pensiun	1,99	0,43	0,004	0,52%	0,55%	0,10%	1,43%	0,00%
45	Jasa keuangan lainnya	2,73	0,74	0,007	0,48%	0,87%	0,13%	0,41%	0,00%

Kode	Sektor	Pengganda Tipe-II			Porsi Output	Porsi Pendapatan	Porsi Ketenaga-kerjaan	Porsi Konsumsi Rumah Tangga	Porsi Konsumsi Pemerintah
		Output	Pendapatan	Ketenaga-kerjaan					
46	Layangan dukungan keuangan	2,73	0,74	0,007	0,06%	0,11%	0,02%	0,05%	0,00%
47	Real estat	1,75	0,22	0,003	1,60%	0,56%	0,35%	4,32%	0,00%
48	Layanan perusahaan	2,54	0,53	0,008	1,95%	2,18%	1,76%	0,32%	0,00%
49	Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	3,26	0,87	0,012	3,16%	6,96%	3,50%	0,05%	60,11%
50	Layanan pendidikan	3,07	0,96	0,016	2,16%	6,00%	5,06%	3,83%	19,98%
51	Layanan kesehatan dan kegiatan pekerjaan sosial	2,93	0,58	0,010	1,78%	1,99%	1,68%	2,87%	18,32%
52	Layanan lainnya	2,82	0,65	0,014	2,11%	3,30%	4,46%	3,66%	0,00%

Sumber: Perhitungan penulis.

Lampiran 2. Analisis sensitivitas elastisitas

Sebagai bagian dari analisis sensitivitas, penelitian ini menguji beberapa rangkaian estimasi elastisitas harga rokok. Tabel A2.1 menyajikan hasil dari skenario reformasi yang paling komprehensif yang menggabungkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 50 persen dengan penyederhanaan struktur cukai delapan tingkat saat ini menjadi empat tingkat serta mengkaji bagaimana estimasi dampaknya bervariasi berdasarkan asumsi elastisitas alternatif.

Tabel A2.1 Sensitivitas estimasi dampak terhadap asumsi elastisitas alternatif

	Elastisitas batas bawah	Analisis utama	Elastisitas batas atas	Estimasi ulang SUSENAS
Elastisitas harga sendiri SPM	-0,300	-0,338	-0,967	-1,496
Elastisitas harga sendiri SKM	-0,231	-0,800	-0,840	-1,249
Elastisitas harga sendiri SKT	-0,231	-0,800	-0,840	-1,315
Elastisitas harga silang:				
SPM→ SKM	0,163	0,163	0,163	-0,051
SPM→ SKT	0,163	0,163	0,163	0,299
SKM→ SPM	0,163	0,163	0,163	-0,603
SKM→ SKT	0,200	0,350	0,500	0,110
SKT→SPM	0,163	0,163	0,163	0,594
SKT→ SKM	0,200	0,350	0,500	0,018
Perubahan pada konsumsi (%)				
Perubahan pada konsumsi rokok — SKT	8,1	0,5	5,7	-17,7
Perubahan pada konsumsi rokok — SKM	0,6	-19,5	-17,6	-53,5
Perubahan pada konsumsi rokok — SPM	-0,9	-0,3	-21,0	-59,9
Perubahan total pada konsumsi rokok	3,9	-10,1	-7,3	-37,8
Total tambahan penerimaan pemerintah dari cukai (Triliun rupiah)	187,73	109,56	118,10	-37,40
Tambahan penerimaan dari cukai rokok	153,03	91,37	97,78	-24,23
Tambahan pendapatan pajak daerah	15,30	9,14	9,77	-2,42
Pendapatan PPN tambahan	19,39	9,06	10,57	-10,75
Dampak makroekonomi pada simulasi C *(alokasi pemerintah paling optimal)*				
Dampak terhadap output (Triliun rupiah)	527,61	315,09	337,11	-82,30
Dampak terhadap pendapatan (Triliun rupiah)	136,22	81,68	87,28	-20,51
Dampak terhadap tenaga kerja (ribuan)	1.762	1.145	1.223	-33

Sumber: Perhitungan penulis.

Seluruh estimasi elastisitas yang dipertimbangkan dalam analisis ini diperoleh menggunakan metodologi Deaton dan nilai unit berbasis pengeluaran rumah tangga [24,25], sehingga menghasilkan pendekatan estimasi yang secara umum konsisten di berbagai spesifikasi elastisitas alternatif. Namun, estimasi ulang elastisitas yang didasarkan pada data gabungan Susenas tahun 2017–2024 menunjukkan permintaan rokok yang jauh lebih elastis dibandingkan dengan estimasi yang digunakan dalam analisis utama maupun yang umumnya dilaporkan dalam literatur ekonomi tembakau yang lebih luas di mana permintaan rokok biasanya ditemukan bersifat inelastis terhadap harga [25]. Saat diterapkan pada skenario reformasi 50 persen, tingkat elastisitas yang lebih tinggi ini mengimplikasikan penurunan konsumsi rokok yang jauh lebih besar, karena persentase penurunan permintaan melampaui persentase kenaikan harga rokok. Hal ini mengakibatkan kontraksi aktivitas di sektor rokok dan, pada akhirnya, dampak bersih simulasi yang negatif terhadap output ekonomi, bertolak belakang dengan dampak bersih makroekonomi positif yang diperkirakan dalam analisis utama.

Oleh karena itu, hasil Susenas terbaru harus diinterpretasikan sebagai kasus sensitivitas alternatif daripada sebagai prediksi dampak ekonomi yang mungkin terjadi dari reformasi tersebut. Yang penting, estimasi ini masih menghasilkan efek makroekonomi bersih yang positif di bawah kenaikan cukai 10 persen dan 25 persen (Tabel A2.2), menunjukkan bahwa hasil negatif hanya muncul ketika respons permintaan yang jauh lebih tinggi dan elastis secara tidak lazim dikombinasikan dengan kenaikan cukai terbesar yang diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini menggarisbawahi bahwa efek makroekonomi yang diperkirakan bergantung baik pada besaran reformasi cukai maupun pada asumsi mengenai responsivitas permintaan rokok.

Tabel A2.2 Dampak berdasarkan elastisitas Susenas tahun 2020–2024 pada berbagai skenario kenaikan cukai di bawah penyederhanaan tingkat cukai yang komprehensif

	10% (4 tingkat)	25% (4 tingkat)	50% (4 tingkat)
Perubahan pada konsumsi (%)			
Perubahan pada konsumsi rokok — SKT	-11,3	-13,7	-17,7
Perubahan pada konsumsi rokok — SKM	-15,9	-30,0	-53,5
Perubahan pada konsumsi rokok — SPM	-10,8	-29,2	-59,9
Perubahan total pada konsumsi rokok	-13,7	-22,7	-37,8
Total pendapatan pajak tambahan (Triliun rupiah)	8,35	40	-37,40
Dampak makroekonomi pada simulasi C *(alokasi pemerintah paling optimal)*			
Dampak terhadap output (Triliun rupiah)	32,33	13,97	-83,30
Dampak terhadap pendapatan agregat (Triliun rupiah)	8.75	4,24	-20,51
Dampak terhadap lapangan kerja (ribuan)	166,8	167,5	-33

Sumber: Perhitungan penulis.

Lampiran 3. Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario (C, D, dan E)

Tabel A3.1 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario C (konvensional/business as usual)

	C1				C2				C3			
Full tax pass-through	**SIM C1.1**	**SIM C1.2**	**SIM C1.3**	**SIM C1.4**	**SIM C2.1**	**SIM C2.2**	**SIM C2.3**	**SIM C2.4**	**SIM C3.1**	**SIM C3.2**	**SIM C3.3**	**SIM C3.4**
	10%	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun)	**18,96**	**25,77**	**36,18**	**43,84**	**44,89**	**49,91**	**65,24**	**71,37**	**81,38**	**81,98**	**107,39**	**109,57**
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	15,69	21,43	30,26	36,71	37,15	41,45	54,36	59,57	67,41	68,12	89,36	91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	1,57	2,14	3,03	3,67	3,71	4,15	5,44	5,96	6,74	6,81	8,94	9,14
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	1,71	2,20	2,89	3,47	4,03	4,31	5,45	5,85	7,23	7,04	9,09	9,06
Belanja ke sektor wajib (Rp triliun)	**2,04**	**2,79**	**3,93**	**4,77**	**4,83**	**5,39**	**7,07**	**7,74**	**8,76**	**8,86**	**11,62**	**11,88**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	10,8%	10,8%	10,9%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun)	**16,92**	**22,99**	**32,25**	**39,07**	**40,06**	**44,52**	**58,18**	**63,62**	**72,62**	**73,12**	**95,77**	**97,69**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	89,2%	89,2%	89,1%	89,1%	89,2%	89,2%	89,2%	89,1%	89,2%	89,2%	89,2%	89,2%
A. Alokasi belanja dari penerimaan cukai rokok												
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	**15,69**	**21,43**	**30,26**	**36,71**	**37,15**	**41,45**	**54,36**	**59,57**	**67,41**	**68,12**	**89,36**	**91,37**
A1. Sektor wajib	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3)	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin (sektor 27)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor 30)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Jasa Pendidikan (sektor 50)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 51)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 51)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
A2. Sektor sasaran	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor 19)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor 42)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	C1				C2				C3			
Full tax pass-through	**SIM C1.1**	**SIM C1.2**	**SIM C1.3**	**SIM C1.4**	**SIM C2.1**	**SIM C2.2**	**SIM C2.3**	**SIM C2.4**	**SIM C3.1**	**SIM C3.2**	**SIM C3.3**	**SIM C3.4**
	10%	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*
Sektor terkait program bantuan sosial:												
Industri Makanan dan Minuman (sektor 13)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**
B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah												
Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan 50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.												
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	**1,57**	**2,14**	**3,03**	**3,67**	**3,71**	**4,15**	**5,44**	**5,96**	**6,74**	**6,81**	**8,94**	**9,14**
B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%
Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) — Daerah	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea Cukai (sektor 49)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
B2. Sektor sasaran	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
B3. Sektor lain / belanja business as usual	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
C. Alokasi belanja dari penerimaan PPN rokok												
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
C1. Sektor wajib	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2. Sektor sasaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)

Tabel A3.2 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.I (sektor terkait kesehatan)

	D1.I				D2.I				D3.I			
Full tax pass-through	**SIM D1.1.I**	**SIM D1.2.I**	**SIM D1.3.I**	**SIM D1.4.I**	**SIM D2.1.I**	**SIM D2.2.I**	**SIM D2.3.I**	**SIM D2.4.I**	**SIM D3.1.I**	**SIM D3.2.I**	**SIM D3.3.I**	**SIM D3.4.I**
	10%	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun)	**18,96**	**25,77**	**36,18**	**43,84**	**44,89**	**49,91**	**65,24**	**71,37**	**81,38**	**81,98**	**107,39**	**109,57**
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	15,69	21,43	30,26	36,71	37,15	41,45	54,36	59,57	67,41	68,12	89,36	91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	1,57	2,14	3,03	3,67	3,71	4,15	5,44	5,96	6,74	6,81	8,94	9,14
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	1,71	2,20	2,89	3,47	4,03	4,31	5,45	5,85	7,23	7,04	9,09	9,06
Belanja ke sektor wajib (Rp triliun)	**2,04**	**2,79**	**3,93**	**4,77**	**4,83**	**5,39**	**7,07**	**7,74**	**8,76**	**8,86**	**11,62**	**11,88**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	10,8%	10,8%	10,9%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun)	**15,21**	**20,79**	**29,35**	**35,61**	**36,03**	**40,21**	**52,73**	**57,78**	**65,39**	**66,08**	**86,68**	**88,63**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	80,2%	80,7%	81,1%	81,2%	80,3%	80,6%	80,8%	81,0%	80,4%	80,6%	80,7%	80,9%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	9,0%	8,5%	8,0%	7,9%	9,0%	8,6%	8,4%	8,2%	8,9%	8,6%	8,5%	8,3%
A. Alokasi belanja dari penerimaan cukai rokok												
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	**15,69**	**21,43**	**30,26**	**36,71**	**37,15**	**41,45**	**54,36**	**59,57**	**67,41**	**68,12**	**89,36**	**91,37**
A1. Sektor wajib	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3)	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin (sektor 27)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor 30)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Jasa Pendidikan (sektor 50)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 51)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 51)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
A2. Sektor sasaran	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49)	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%	37,1%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51)	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor 19)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor 42)	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%	7,9%
Sektor terkait program bantuan sosial:												
Industri Makanan dan Minuman (sektor 13)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	D1.I				D2.I				D3.I			
Full tax pass-through	**SIM D1.1.I**	**SIM D1.2.I**	**SIM D1.3.I**	**SIM D1.4.I**	**SIM D2.1.I**	**SIM D2.2.I**	**SIM D2.3.I**	**SIM D2.4.I**	**SIM D3.1.I**	**SIM D3.2.I**	**SIM D3.3.I**	**SIM D3.4.I**
	10%	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penye-derhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penye-derhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penye-derhanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah												
Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan 50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.												
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	**1,57**	**2,14**	**3,03**	**3,67**	**3,71**	**4,15**	**5,44**	**5,96**	**6,74**	**6,81**	**8,94**	**9,14**
B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%
Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) — Daerah	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea Cukai (sektor 49)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
B2. Sektor sasaran	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
B3. Sektor lain / belanja business as usual	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
C. Alokasi belanja dari penerimaan PPN rokok												
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
C1. Sektor wajib	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2. Sektor sasaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)

Tabel A3.3 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario D.II (pembiayaan kesehatan dan penyediaan layanan)

	D1.II				D2.II				D3.II			
Full tax pass-through	**SIM D1.1.II**	**SIM D1.2.II**	**SIM D1.3.II**	**SIM D1.4.II**	**SIM D2.1.II**	**SIM D2.2.II**	**SIM D2.3.II**	**SIM D2.4.II**	**SIM D3.1.II**	**SIM D3.2.II**	**SIM D3.3.II**	**SIM D3.4.II**
	10%	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun)	**18,96**	**25,77**	**36,18**	**43,84**	**44,89**	**49,91**	**65,24**	**71,37**	**81,38**	**81,98**	**107,39**	**109,57**
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	15,69	21,43	30,26	36,71	37,15	41,45	54,36	59,57	67,41	68,12	89,36	91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	1,57	2,14	3,03	3,67	3,71	4,15	5,44	5,96	6,74	6,81	8,94	9,14
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	1,71	2,20	2,89	3,47	4,03	4,31	5,45	5,85	7,23	7,04	9,09	9,06
Belanja ke sektor wajib (Rp triliun)	**2,04**	**2,79**	**3,93**	**4,77**	**4,83**	**5,39**	**7,07**	**7,74**	**8,76**	**8,86**	**11,62**	**11,88**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	10,8%	10,8%	10,9%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun)	**15,21**	**20,79**	**29,35**	**35,61**	**36,03**	**40,21**	**52,73**	**57,78**	**65,39**	**66,08**	**86,68**	**88,63**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	80,2%	80,7%	81,1%	81,2%	80,3%	80,6%	80,8%	81,0%	80,4%	80,6%	80,7%	80,9%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	9,0%	8,5%	8,0%	7,9%	9,0%	8,6%	8,4%	8,2%	8,9%	8,6%	8,5%	8,3%
A. Alokasi belanja dari penerimaan cukai rokok												
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	**15,69**	**21,43**	**30,26**	**36,71**	**37,15**	**41,45**	**54,36**	**59,57**	**67,41**	**68,12**	**89,36**	**91,37**
A1. Sektor wajib	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3)	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin (sektor 27)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor 30)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Jasa Pendidikan (sektor 50)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 51)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 51)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
A2. Sektor sasaran	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49)	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51)	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor 19)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27)	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50)	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor 42)	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%

	D1.II				D2.II				D3.II			
Full tax pass-through	**SIM D1.1.II**	**SIM D1.2.II**	**SIM D1.3.II**	**SIM D1.4.II**	**SIM D2.1.II**	**SIM D2.2.II**	**SIM D2.3.II**	**SIM D2.4.II**	**SIM D3.1.II**	**SIM D3.2.II**	**SIM D3.3.II**	**SIM D3.4.II**
	10%	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*
Sektor terkait program bantuan sosial:												
Industri Makanan dan Minuman (sektor 13)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah												
Catatan: 2,5% dari PRD (Rp triliun) ditahan oleh pemerintah pusat (Bea Cukai) untuk penegakan hukum kepabeanan dan cukai sesuai PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan 50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan/Kesehatan/Dukungan JKN.												
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	**1,57**	**2,14**	**3,03**	**3,67**	**3,71**	**4,15**	**5,44**	**5,96**	**6,74**	**6,81**	**8,94**	**9,14**
B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%
Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) — Daerah	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea Cukai (sektor 49)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
B2. Sektor sasaran	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
B3. Sektor lain / belanja business as usual	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
C. Alokasi belanja dari penerimaan PPN rokok												
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
C1. Sektor wajib	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2. Sektor sasaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)

Tabel A3.4 Alokasi belanja pemerintah berdasarkan skenario E (program bantuan sosial)

	E1				E2				E3			
Full tax pass-through	**SIM E1.1**	**SIM E1.2**	**SIM E1.3**	**SIM E1.4**	**SIM E2.1**	**SIM E2.2**	**SIM E2.3**	**SIM E2.4**	**SIM E3.1**	**SIM E3.2**	**SIM E3.3**	**SIM E3.4**
	10%	*10% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penye-derhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penye-derhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyeder-hanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penye-derhanaan kedua jenis)*
Total tambahan penerimaan pajak rokok (Rp triliun)	**18,96**	**25,77**	**36,18**	**43,84**	**44,89**	**49,91**	**65,24**	**71,37**	**81,38**	**81,98**	**107,39**	**109,57**
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	15,69	21,43	30,26	36,71	37,15	41,45	54,36	59,57	67,41	68,12	89,36	91,37
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	1,57	2,14	3,03	3,67	3,71	4,15	5,44	5,96	6,74	6,81	8,94	9,14
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	1,71	2,20	2,89	3,47	4,03	4,31	5,45	5,85	7,23	7,04	9,09	9,06
Belanja ke sektor wajib (Rp triliun)	**2,04**	**2,79**	**3,93**	**4,77**	**4,83**	**5,39**	**7,07**	**7,74**	**8,76**	**8,86**	**11,62**	**11,88**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	10,8%	10,8%	10,9%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,9%	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%
Belanja ke sektor sasaran (Rp triliun)	**15,21**	**20,79**	**29,35**	**35,61**	**36,03**	**40,21**	**52,73**	**57,78**	**65,39**	**66,08**	**86,68**	**88,63**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	80,2%	80,7%	81,1%	81,2%	80,3%	80,6%	80,8%	81,0%	80,4%	80,6%	80,7%	80,9%
Belanja ke sektor lain / business as usual (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
pangsa dari penerimaan pajak rokok (%)	9,0%	8,5%	8,0%	7,9%	9,0%	8,6%	8,4%	8,2%	8,9%	8,6%	8,5%	8,3%
A. Alokasi belanja dari penerimaan cukai rokok												
Tambahan penerimaan dari cukai rokok (Rp triliun)	**15,69**	**21,43**	**30,26**	**36,71**	**37,15**	**41,45**	**54,36**	**59,57**	**67,41**	**68,12**	**89,36**	**91,37**
A1. Sektor wajib	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
Tanaman Musiman dan Perkebunan Tahunan (sektor 3)	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional (sektor 19)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin (sektor 27)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang (sektor 30)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Jasa Informasi dan Komunikasi (sektor 42)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Jasa Pendidikan (sektor 50)	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Publik (sektor 51)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Swasta (sektor 51)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
A2. Sektor sasaran	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**	**97,0%**
Adm. Pemerintahan - Dukungan JKN Diskresioner (sektor 49)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Publik (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Kesehatan - Diskresioner Swasta (sektor 51)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kimia, Farmasi - Diskresioner (sektor 19)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Alat Kesehatan - Diskresioner (sektor 27)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jasa Pendidikan - Diskresioner (sektor 50)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kampanye Pengendalian Tembakau - Diskresioner TIK (sektor 42)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	E1				E2				E3			
Full tax pass-through	**SIM E1.1**	**SIM E1.2**	**SIM E1.3**	**SIM E1.4**	**SIM E2.1**	**SIM E2.2**	**SIM E2.3**	**SIM E2.4**	**SIM E3.1**	**SIM E3.2**	**SIM E3.3**	**SIM E3.4**
	10%	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*10% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*10% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*25%*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*25% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*25% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*	*50%*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok mesin)*	*50% + 6 layer (penyederhanaan rokok tangan)*	*50% + 4 layer (penyederhanaan kedua jenis)*
Sektor terkait program bantuan sosial:												
Industri Makanan dan Minuman (sektor 13)	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Jasa Pendidikan - Publik (sektor 50)	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Jasa Pendidikan - Swasta (sektor 50)	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Jasa Kesehatan - Publik (sektor 51)	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Jasa Kesehatan - Swasta (sektor 51)	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%	16,0%
A3. Sektor lain / belanja business as usual	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
B. Alokasi belanja dari penerimaan pajak rokok daerah												
Catatan: Pemerintah pusat (Bea Cukai) menahan 2,5% dari PRD (Rp triliun) untuk penegakan hukum kepabeanan & dan cukai berdasarkan PMK No. 143 Tahun 2023. Sisa 97,5% ditransfer ke daerah dan dialokasikan 50%/12,5%/37,5% ke Adm. Pemerintahan—/Kesehatan/Dukungan JKN.												
Tambahan penerimaan dari pajak rokok daerah (Rp triliun)	**1,57**	**2,14**	**3,03**	**3,67**	**3,71**	**4,15**	**5,44**	**5,96**	**6,74**	**6,81**	**8,94**	**9,14**
B1. Sektor wajib (alokasi PRD untuk pusat & daerah)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sektor 49) — Daerah	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 51) — Daerah	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%	12,1875%
Administrasi Pemerintahan - Dukungan JKN (sektor 49) — Daerah	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%	36,5625%
Administrasi Pemerintahan - Penegakan Hukum Pusat / Bea Cukai (sektor 49)	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
B2. Sektor sasaran	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
B3. Sektor lain / belanja business as usual	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
C. Alokasi belanja dari penerimaan PPN rokok												
Tambahan penerimaan dari PPN rokok (Rp triliun)	**1,71**	**2,20**	**2,89**	**3,47**	**4,03**	**4,31**	**5,45**	**5,85**	**7,23**	**7,04**	**9,09**	**9,06**
C1. Sektor wajib	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C2. Sektor sasaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C3. Sektor lain / belanja business as usual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan Tabel IO 2025 (55 sektor)

cisdi

Jl. Probolinggo No.40C 1, RT.1/RW.2, Kec. Gondangdia,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10350